



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1335, 2022

KEMENKEU. Indikator Tingkat Kinerja Daerah.
Ketentuan Umum bagian DAU. Tahun Anggaran
2023.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 212/PMK.07/2022
TENTANG
INDIKATOR TINGKAT KINERJA DAERAH DAN KETENTUAN UMUM BAGIAN
DANA ALOKASI UMUM YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (13) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG INDIKATOR TINGKAT KINERJA DAERAH DAN KETENTUAN UMUM BAGIAN DANA ALOKASI UMUM YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
8. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 2

Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya terdiri atas:

- a. penggajian formasi PPPK;
- b. pendanaan Kelurahan;
- c. bidang pendidikan;
- d. bidang kesehatan; dan
- e. bidang pekerjaan umum.

Pasal 3

- (1) Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk penggajian formasi PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditentukan berdasarkan:
 - a. jumlah formasi PPPK;
 - b. gaji pokok dan tunjangan melekat; dan
 - c. jumlah bulan pembayaran gaji PPPK.
- (2) Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ditentukan berdasarkan satuan biaya per Kelurahan dan jumlah Kelurahan tiap-tiap Pemerintah Daerah.
- (3) Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dan bidang pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e pada Daerah provinsi dan kabupaten/kota, dihitung berdasarkan indikator yang mencerminkan tingkat kinerja Daerah pada tiap-tiap urusan Pemerintahan Daerah.
- (4) Indikator yang mencerminkan tingkat kinerja Daerah pada tiap-tiap urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan indeks komposit dari beberapa indikator kinerja tiap-tiap bidang.
- (5) Indeks komposit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. bidang pendidikan, yang dihitung berdasarkan indikator:
 1. rata-rata lama sekolah;

2. angka partisipasi murni;
 3. tingkat penyelesaian sekolah;
 4. persentase guru layak;
 5. rasio kelas layak; dan
 6. peta mutu pendidikan;
- b. bidang kesehatan, yang dihitung berdasarkan indikator:
1. usia harapan hidup;
 2. persalinan ditolong tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan;
 3. persentase bayi, balita yang mendapat imunisasi dasar lengkap; dan
 4. balita dengan gizi normal; dan
- c. bidang pekerjaan umum, yang dihitung berdasarkan indikator:
1. persentase keluarga dengan akses terhadap air minum layak;
 2. persentase keluarga dengan akses terhadap sanitasi layak;
 3. kondisi jalan mantap;
 4. rasio elektrifikasi; dan
 5. kualitas sinyal telepon dan sinyal internet.

Pasal 4

- (1) Penggunaan bagian DAU penggajian formasi PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan bagian DAU pendanaan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (3) Penggunaan bagian DAU bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dan bidang pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dilakukan untuk kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar.

Pasal 5

- (1) Bagian DAU penggajian formasi PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan pendanaan yang digunakan untuk pembayaran gaji pokok dan tunjangan melekat pada formasi PPPK tahun 2022 dan

tahun 2023 yang diangkat pada tahun 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Formasi PPPK tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PPPK:
 - a. yang telah lulus dan memperoleh nomor induk pegawai pada tahun 2022; dan
 - b. yang telah diangkat menjadi ASN di Daerah.
- (3) Jumlah formasi PPPK tahun 2022 dan tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penetapan kebutuhan formasi tahun 2022 dan proyeksi kebutuhan formasi tahun 2023 yang disampaikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
- (4) Rincian jumlah formasi PPPK tahun 2022 dan tahun 2023 yang diperhitungkan dalam bagian DAU penggajian formasi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Bagian DAU pendanaan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dialokasikan untuk memberi dukungan pendanaan kepada Daerah kabupaten/kota dalam memenuhi kewajiban pendanaan bagi Kelurahan.
- (2) Bagian DAU pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b digunakan untuk kegiatan fisik dan/atau nonfisik.
- (3) Bagian DAU pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi komitmen pendanaan Pemerintah Daerah kepada Kelurahan melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah mengalokasikan bagian DAU pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dikalikan dengan jumlah Kelurahan pada tiap-tiap Pemerintah Daerah.
- (5) Jumlah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan data jumlah Kelurahan yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri yang digunakan dalam perhitungan alokasi DAU tahun 2023.
- (6) Rincian jumlah Kelurahan dan pagu bagian DAU pendanaan Kelurahan per Daerah tercantum dalam

huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Bagian DAU pendanaan Kelurahan untuk setiap Kelurahan dialokasikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dibagikan kepada seluruh Kelurahan secara merata; atau
 - b. dibagikan kepada seluruh Kelurahan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi berdasarkan kebutuhan dan/atau kinerja Kelurahan.
- (2) Pagu alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu bagian DAU pendanaan Kelurahan dibagi kepada seluruh Kelurahan secara merata.
- (3) Pagu alokasi berdasarkan kebutuhan dan/atau kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu DAU pendanaan Kelurahan dengan memperhatikan:
 - a. jumlah penduduk;
 - b. angka kemiskinan;
 - c. luas wilayah;
 - d. ketersediaan pelayanan dasar;
 - e. kondisi infrastruktur;
 - f. transportasi/aksesibilitas setiap Kelurahan; dan/atau
 - g. indikator lain sesuai kebijakan dan prioritas Daerah.
- (4) Data untuk menghitung alokasi berdasarkan kebutuhan dan/atau kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari lembaga pemerintah yang berwenang.

Pasal 8

- (1) Penggunaan bagian DAU bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan untuk mendanai kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan kegiatan dan subkegiatan prioritas serta kegiatan dan subkegiatan pendukung sebagaimana tercantum dalam Huruf C Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Penentuan besaran pendanaan kegiatan fisik dan/atau nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan kebutuhan Daerah dengan memperhatikan prioritas nasional.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja yang terkait dengan:

- a. peningkatan capaian SPM bidang pendidikan; dan
 - b. belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan melekat yang dibayarkan kepada ASN guru dan tenaga kependidikan Daerah.
- (4) Belanja pegawai yang dibayarkan kepada ASN guru dan tenaga kependidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah alokasi bagian DAU bidang pendidikan.
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk:
- a. belanja pegawai selain gaji dan tunjangan melekat yang dibayarkan kepada ASN guru dan tenaga kependidikan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. belanja honorarium yang tidak mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar; dan
 - c. belanja perjalanan dinas yang tidak mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar.

Pasal 9

- (1) Penggunaan bagian DAU bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dilakukan untuk mendanai kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang kesehatan sesuai dengan kegiatan dan subkegiatan prioritas serta kegiatan dan subkegiatan pendukung sebagaimana tercantum dalam huruf D Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja yang terkait dengan:
- a. peningkatan capaian SPM bidang kesehatan;
 - b. belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan melekat yang dibayarkan kepada ASN di bidang kesehatan; dan
 - c. belanja pemenuhan Jaminan Kesehatan Nasional.
- (3) Belanja pegawai yang dibayarkan kepada ASN di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah alokasi bagian DAU bidang kesehatan.
- (4) Belanja pemenuhan Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah alokasi bagian DAU bidang kesehatan.
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk:

- a. belanja pegawai selain gaji dan tunjangan melekat yang dibayarkan kepada ASN bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. belanja honorarium yang tidak mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar; dan
- c. belanja perjalanan dinas yang tidak mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar.

Pasal 10

- (1) Penggunaan bagian DAU bidang pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dilakukan untuk mendanai kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang pekerjaan umum sesuai dengan kegiatan dan subkegiatan prioritas serta kegiatan dan subkegiatan pendukung sebagaimana tercantum dalam huruf E Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk belanja yang terkait dengan peningkatan capaian SPM bidang pekerjaan umum.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk:
 - a. belanja pegawai yang dibayarkan kepada ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. belanja honorarium yang tidak mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar; dan
 - c. belanja perjalanan dinas yang tidak mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan belanja untuk bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk penggajian formasi PPPK, pendanaan Kelurahan, bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan umum dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal jumlah Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6):
 - a. lebih besar dari jumlah Kelurahan yang dimiliki Pemerintah Daerah, besaran penganggaran bagian DAU pendanaan Kelurahan dalam APBD dilakukan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dikalikan dengan jumlah Kelurahan yang dimiliki Pemerintah Daerah; atau

- b. lebih kecil dari jumlah Kelurahan yang dimiliki Pemerintah Daerah, besaran penganggaran DAU pendanaan Kelurahan dalam APBD dilakukan paling banyak sebesar alokasi DAU pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).
- (3) Dalam hal Daerah belum menganggarkan belanja untuk bagian DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam APBD Tahun Anggaran 2023, kepala Daerah menganggarkan dalam perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 12

Belanja yang didanai dari bagian DAU yang penggunaannya telah ditentukan, dilaksanakan dengan prinsip tidak tumpang tindih dengan pendanaan dari sumber pendanaan lainnya.

Pasal 13

Penganggaran dan pelaksanaan kegiatan yang didanai dari bagian DAU yang penggunaannya telah ditentukan diawasi oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 212/PMK.07/2022
TENTANG INDIKATOR TINGKAT KINERJA DAERAH DAN
KETENTUAN UMUM BAGIAN DANA ALOKASI UMUM YANG
DITENTUKAN PENGGUNAANNYA TAHUN ANGGARAN 2023

A. RINCIAN JUMLAH FORMASI PPPK TAHUN 2022 DAN TAHUN 2023 YANG
DIPERHITUNGKAN DALAM BAGIAN DAU PENGGAJIAN FORMASI PPPK

No	Daerah	Jumlah Formasi PPPK 2022				Jumlah Formasi PPPK 2023				*) Bagian DAU Pengajian Formasi PPPK (dalam rupiah)
		Guru	Tenaga Keseha- tan	Teknis	Total	Guru	Tenaga Keseha- tan	Teknis	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Provinsi Aceh	4.491	1.797	44	6.332	501	1.383	-	1.884	263.829.432.000,00
2	Kab. Aceh Barat	240	80	69	389	413	47	-	460	19.862.052.000,00
3	Kab. Aceh Besar	-	-	-	-	769	39	91	919	9.754.266.000,00
4	Kab. Aceh Selatan	85	50	5	140	760	-	4	764	13.731.264.000,00
5	Kab. Aceh Singkil	274	245	80	599	119	143	-	262	25.847.160.000,00
6	Kab. Aceh Tengah	673	13	-	686	316	368	44	728	34.143.480.000,00
7	Kab. Aceh Tenggara	521	195	-	716	314	74	92	480	32.666.448.000,00
8	Kab. Aceh Timur	988	143	40	1.171	561	-	-	561	51.047.322.000,00
9	Kab. Aceh Utara	277	-	-	277	1.347	73	16	1.436	25.908.420.000,00
10	Kab. Bireuen	685	126	-	811	513	352	-	865	40.796.178.000,00
11	Kab. Pidie	193	92	16	301	905	193	-	1.098	23.245.080.000,00
12	Kab. Simeulue	704	287	8	999	166	-	-	166	40.231.416.000,00
13	Kota Banda Aceh	371	392	-	763	107	696	3	806	37.936.488.000,00
14	Kota Sabang	26	-	-	26	26	132	-	158	2.678.220.000,00
15	Kota Lingsa	90	-	-	90	227	426	29	682	10.704.468.000,00
16	Kota Lhokseumawe	371	110	40	521	57	1	-	58	20.678.280.000,00
17	Kab. Cayo Lues	490	125	10	625	166	156	16	338	27.635.032.000,00
18	Kab. Aceh Barat Daya	150	50	19	219	219	333	-	574	14.525.688.000,00
19	Kab. Aceh Jaya	371	105	-	476	164	325	18	507	23.711.106.000,00
20	Kab. Nagan Raya	362	100	27	489	210	-	-	210	21.059.352.000,00
21	Kab. Aceh Tamiang	481	108	138	727	238	-	-	238	30.531.448.000,00
22	Kab. Bener Meriah	651	402	69	1.122	196	-	-	196	45.286.320.000,00
23	Kab. Pidie Jaya	75	30	28	133	162	185	-	347	8.804.622.000,00
24	Kota Subussalam	21	70	-	91	223	-	-	223	5.871.150.000,00
25	Provinsi Sumatera Utara	900	44	20	964	13.209	546	466	14.221	188.063.406.000,00
26	Kab. Asahan	108	-	-	108	2.913	380	-	3.293	39.110.766.000,00
27	Kab. Dairi	620	-	-	620	1.090	291	50	1.431	39.063.594.000,00
28	Kab. Deli Serdang	-	-	-	-	1.741	338	-	2.079	22.066.506.000,00
29	Kab. Karo	404	80	-	484	1.193	234	65	1.492	34.473.960.000,00
30	Kab. Labuhanbatu	646	-	-	646	1.651	-	-	1.651	42.399.882.000,00
31	Kab. Langkat	675	50	48	773	2.097	992	47	4.036	72.604.788.000,00
32	Kab. Mandailing Natal	1.025	-	-	1.025	921	11	51	983	49.904.262.000,00
33	Kab. Nias	341	-	13	354	1.124	8	7	1.139	25.721.178.000,00
34	Kab. Simalungun	186	-	-	186	4.473	1.084	-	5.557	66.344.486.000,00
35	Kab. Tapanuli Selatan	208	52	19	279	1.648	748	-	2.396	36.174.876.000,00
36	Kab. Tapanuli Tengah	180	50	-	230	2.557	548	42	3.147	42.259.098.000,00
37	Kab. Tapanuli Utara	1.181	763	99	2.043	1.324	390	-	1.714	96.864.240.000,00
38	Kab. Toba	517	-	40	557	825	10	-	835	30.311.646.000,00
39	Kota Binjai	380	45	4	429	158	56	23	237	19.035.450.000,00
40	Kota Medan	1.057	121	-	1.178	2.820	228	68	3.116	78.435.648.000,00
41	Kota Pematang Siantar	601	31	-	632	739	47	61	847	33.327.114.000,00

7

No	Daerah	Jumlah Formasi PPPK 2022				Jumlah Formasi PPPK 2023				*) Bagian DAU Penggajian Formasi PPPK (dalam rupiah)
		Guru	Tenaga Kesehatan	Teknis	Total	Guru	Tenaga Kesehatan	Teknis	Total	
42	Kota Sibolga	64	50	-	114	73	-	-	73	5.164.734.000,00
43	Kota Tanjung Balai	270	-	-	270	330	2	23	355	14.165.130.000,00
44	Kota Tebing Tinggi	158	-	-	158	370	11	25	406	10.393.546.000,00
45	Kota Padangsidimpuan	130	-	-	130	0	-	-	-	5.006.040.000,00
46	Kab. Pakpak Bharat	62	108	-	170	232	166	10	408	10.876.872.000,00
47	Kab. Nias Selatan	392	100	-	492	3.176	855	25	4.056	61.996.320.000,00
48	Kab. Humbang Hasundutan	-	-	-	-	1.146	890	32	2.068	21.949.752.000,00
49	Kab. Serdang Bedagai	300	-	-	300	3.056	150	19	3.225	53.484.150.000,00
50	Kab. Simaloa	176	119	-	295	760	176	-	896	30.870.004.000,00
51	Kab. Batu Bara	411	-	-	411	1.529	191	12	1.732	34.210.236.000,00
52	Kab. Padang Lawas	824	104	65	993	155	60	-	215	40.520.454.000,00
53	Kab. Padang Lawas Utara	159	110	15	284	1.079	392	-	1.471	26.549.466.000,00
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	264	-	-	264	1.506	245	20	1.774	28.995.348.000,00
55	Kab. Labuhanbatu Utara	96	22	18	136	508	-	-	508	10.706.016.000,00
56	Kab. Nias Utara	-	251	3	254	532	252	1	785	18.113.022.000,00
57	Kab. Nias Barat	354	220	10	584	180	1	-	181	24.409.806.000,00
58	Kota Gumintang	184	-	-	184	431	148	21	600	13.453.872.000,00
59	Provinsi Sumatera Barat	1.927	384	205	2.516	4.488	379	225	5.092	150.932.616.000,00
60	Kab. Lima Puluh Kota	622	89	190	904	335	15	-	350	38.526.132.000,00
61	Kab. Agam	461	254	51	766	1.494	221	-	1.715	47.700.138.000,00
62	Kab. Kepulauan Mentawai	341	-	-	341	434	512	22	968	23.408.580.000,00
63	Kab. Padang Pariaman	1.088	170	196	1.454	1.831	121	-	1.952	76.709.160.000,00
64	Kab. Pasaman	586	299	65	950	1.406	253	-	1.659	54.191.226.000,00
65	Kab. Pasaman Selatan	1.269	150	197	1.616	2.161	839	-	3.000	94.070.928.000,00
66	Kab. Sijunjung	928	93	53	1.074	427	123	-	550	47.195.292.000,00
67	Kab. Solok	134	-	-	134	1.510	843	-	2.353	30.134.814.000,00
68	Kab. Tanah Datar	887	90	49	1.026	1.339	286	-	1.625	56.756.958.000,00
69	Kota Bukit Tinggi	158	67	138	363	294	173	-	467	18.935.142.000,00
70	Kota Padang Panjang	41	106	48	195	102	79	-	181	9.430.194.000,00
71	Kota Padang	-	-	-	-	2.567	541	190	3.301	35.036.814.000,00
72	Kota Payakumbuh	233	120	71	424	204	347	34	585	22.536.582.000,00
73	Kota Sawahlunto	112	169	170	451	84	211	2	297	20.519.466.000,00
74	Kota Solok	38	-	-	38	146	95	-	241	4.021.278.000,00
75	Kota Pariaman	-	-	-	-	61	-	-	61	647.454.000,00
76	Kab. Pasaman Barat	418	743	320	1.481	830	318	-	1.148	69.215.220.000,00
77	Kab. Dharmasraya	838	303	81	1.222	839	255	-	1.094	58.668.492.000,00
78	Kab. Solok Selatan	-	-	-	-	358	32	-	390	4.139.460.000,00
79	Provinsi Riau	7.297	168	223	7.688	8.908	328	-	9.236	394.080.408.000,00
80	Kab. Bengkalis	1.987	169	56	2.212	2.209	517	-	2.726	114.113.460.000,00
81	Kab. Indragiri Hilir	342	60	24	426	3.480	38	-	3.518	53.744.460.000,00
82	Kab. Indragiri Hulu	227	111	16	354	2.169	264	-	2.433	39.455.694.000,00
83	Kab. Kampar	-	-	-	-	4.482	799	166	5.447	57.814.438.000,00
84	Kab. Kuantan Singingi	-	-	-	-	817	221	-	1.038	11.017.332.000,00
85	Kab. Pelawan	1.056	17	10	1.083	2.157	600	5	2.822	71.656.872.000,00
86	Kab. Rokan Hilir	1.013	426	143	1.582	229	-	-	229	63.350.262.000,00
87	Kab. Rokan Hulu	592	39	78	709	3.199	23	-	3.222	61.500.480.000,00
88	Kab. Siak	1.539	576	35	2.150	512	480	-	992	93.321.288.000,00
89	Kota Dumai	152	90	8	250	604	549	-	1.153	21.864.942.000,00
90	Kota Pekanbaru	260	69	48	377	2.419	29	-	2.448	40.500.588.000,00
91	Kab. Kepulauan Meranti	500	440	65	1.005	200	260	-	460	43.582.980.000,00

7

No	Daerah	Jumlah Formasi PPPK 2022				Jumlah Formasi PPPK 2023				*1 Bagian DAU Penggajian Formasi PPPK (dalam rupiah)
		Guru	Tenaga Kesehatan	Teknis	Total	Guru	Tenaga Kesehatan	Teknis	Total	
92	Provinsi Jambi	108	20	12	140	5.084	632	236	5.952	68.365.618.000,00
93	Kab. Bungarai	950	5	72	1.027	1.318	124	-	1.442	54.833.104.000,00
94	Kab. Bungo	186	-	-	186	1.923	280	-	2.203	30.545.130.000,00
95	Kab. Kerinci	908	40	33	981	1.114	233	-	1.347	36.670.206.000,00
96	Kab. Merangin	410	-	-	410	2.577	508	102	3.187	49.615.098.000,00
97	Kab. Muaro Jambi	353	16	20	389	1.536	55	-	1.591	31.866.486.000,00
98	Kab. Sarolangun	60	44	18	122	1.816	-	-	1.816	23.973.000.000,00
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	300	-	-	300	1.937	530	38	2.505	38.140.470.000,00
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	150	50	-	200	1.523	105	24	1.652	25.235.928.000,00
101	Kab. Tebo	271	-	-	271	2.081	49	-	2.130	33.043.488.000,00
102	Kota Jambi	119	74	-	193	2.202	657	99	2.958	38.828.256.000,00
103	Kota Sungai Penuh	172	-	-	172	356	440	35	831	15.443.610.000,00
104	Provinsi Sumatera Selatan	4.329	-	-	4.329	2.404	355	352	3.111	199.721.286.000,00
105	Kab. Lahat	1.204	-	-	1.204	924	1.772	-	2.696	74.978.976.000,00
106	Kab. Musi Banyuasin	857	97	-	954	1.408	1.896	-	3.304	71.805.288.000,00
107	Kab. Musi Rawas	-	-	-	-	1.034	184	72	1.290	13.692.060.000,00
108	Kab. Muaro Enim	1.386	56	103	1.545	936	353	-	1.289	73.176.306.000,00
109	Kab. Ogan Komering Ilir	2.000	248	-	2.248	2.204	171	-	2.375	111.774.234.000,00
110	Kab. Ogan Komering Ulu	319	249	-	568	1.438	851	149	2.438	47.749.476.000,00
111	Kota Palembang	3.500	200	81	3.781	4.256	1.109	71	5.436	203.296.432.000,00
112	Kota Prabumulih	253	346	340	939	229	332	-	561	42.113.466.000,00
113	Kota Pagar Alam	63	50	18	131	58	180	-	238	7.370.680.000,00
114	Kota Lubuk Linggau	-	23	5	28	472	271	6	749	9.028.110.000,00
115	Kab. Banyuasin	1.424	-	-	1.424	810	1.347	-	2.157	77.729.790.000,00
116	Kab. Ogan Ilir	949	30	67	1.046	516	-	-	516	43.756.192.000,00
117	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	170	-	-	170	1.009	672	-	1.681	24.388.494.000,00
118	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	654	238	-	912	64	46	28	138	36.584.028.000,00
119	Kab. Empat Lawang	54	60	29	143	100	826	-	926	15.335.208.000,00
120	Kab. Pematang Alab Lematang Ilir	523	185	176	884	738	158	-	896	43.551.216.000,00
121	Kab. Musi Rawas Utara	117	67	5	189	1.031	126	-	1.157	19.528.410.000,00
122	Provinsi Bengkulu	-	-	-	-	2.304	241	206	2.751	29.199.114.000,00
123	Kab. Bengkulu Selatan	305	40	35	380	65	289	-	354	18.390.396.000,00
124	Kab. Bengkulu Utara	256	25	-	281	1.648	833	74	2.555	37.939.518.000,00
125	Kab. Rejang Lebong	141	92	31	264	1.112	351	-	1.463	25.694.394.000,00
126	Kota Bengkulu	1.102	344	208	1.654	1.214	365	80	1.659	81.300.858.000,00
127	Kab. Kaur	328	53	6	387	76	227	-	303	18.118.638.000,00
128	Kab. Seluma	493	251	15	759	358	150	-	508	34.619.484.000,00
129	Kab. Mukomuko	10	5	-	15	1.022	591	31	1.644	18.027.036.000,00
130	Kab. Lebong	268	100	20	388	274	282	-	556	20.842.488.000,00
131	Kab. Kepahang	463	-	-	463	544	265	23	832	26.660.052.000,00
132	Kab. Bengkulu Tengah	-	-	-	-	455	283	8	746	7.918.044.000,00
133	Provinsi Lampung	422	210	46	678	7.130	706	-	7.836	109.279.728.000,00
134	Kab. Lampung Barat	55	-	-	55	426	5	28	459	6.989.766.000,00
135	Kab. Lampung Selatan	70	20	10	100	4.202	415	95	4.712	33.863.968.000,00
136	Kab. Lampung Tengah	1.433	71	75	1.579	2.746	24	-	2.770	90.204.912.000,00
137	Kab. Lampung Utara	-	-	-	-	892	168	130	1.190	12.630.660.000,00
138	Kab. Lampung Timur	-	-	-	-	2.238	462	141	2.841	30.154.374.000,00
139	Kab. Tanggamus	414	47	-	461	1.460	55	67	1.582	34.543.536.000,00
140	Kab. Tulang Bawang	-	-	-	-	620	293	35	948	10.062.072.000,00
141	Kab. Way Kanan	-	-	-	-	768	-	-	768	8.151.552.000,00

7

No	Daerah	Jumlah Formasi PPPK 2022				Jumlah Formasi PPPK 2023				*1 Bagian DAU Penggajian Formasi PPPK (dalam rupiah)
		Guru	Tenaga Kesehatan	Teknis	Total	Guru	Tenaga Kesehatan	Teknis	Total	
142	Kota Bandar Lampung	307	-	-	307	1.820	396	-	2.216	35.342.580.000,00
143	Kota Metro	84	-	-	84	370	80	-	450	6.010.972.000,00
144	Kab. Pesawaran	91	48	18	157	1.871	295	-	2.166	29.035.680.000,00
145	Kab. Pringsewu	111	-	-	111	1.041	454	50	1.545	20.673.018.000,00
146	Kab. Mesuji	383	-	-	383	592	294	18	904	24.343.620.000,00
147	Kab. Tulang Bawang Barat	-	-	-	-	496	449	-	945	10.030.230.000,00
148	Kab. Pesisir Barai	556	-	-	556	650	411	16	1.077	32.841.726.000,00
149	Provinsi DKI Jakarta	6.319	8.679	1.083	16.083	14.378	6.066	-	20.444	-
150	Provinsi Jawa Barat	3.800	731	40	4.571	8.900	980	481	10.361	285.991.722.000,00
151	Kab. Bandung	3.203	517	99	3.819	9.840	1.772	5	11.617	262.663.290.000,00
152	Kab. Bekasi	1.020	195	60	1.275	9.298	83	-	9.341	148.243.074.000,00
153	Kab. Bogor	3.039	518	54	3.611	16.141	1.426	-	17.567	325.508.526.000,00
154	Kab. Ciamis	1.190	378	174	1.742	2.302	780	-	3.082	98.252.964.000,00
155	Kab. Cianjur	1.200	150	96	1.446	9.980	1.164	-	11.144	173.964.984.000,00
156	Kab. Cirebon	971	72	26	1.069	3.650	2.550	93	6.293	107.958.954.000,00
157	Kab. Garut	3.326	1.786	175	5.287	10.522	1.712	-	12.234	333.443.472.000,00
158	Kab. Indramayu	280	81	144	505	6.385	473	137	6.995	93.691.470.000,00
159	Kab. Karawang	2.247	658	519	3.424	7.034	546	-	7.580	212.305.512.000,00
160	Kab. Kuningan	767	100	174	1.041	1.696	822	-	2.518	66.812.890.000,00
161	Kab. Majalengka	1.206	-	-	1.206	1.391	34	204	1.629	63.730.854.000,00
162	Kab. Purwakarta	238	69	42	349	3.650	662	64	4.376	99.886.156.000,00
163	Kab. Subang	830	133	49	1.012	3.336	450	-	3.786	79.154.700.000,00
164	Kab. Sukabumi	886	70	174	1.130	8.146	2.048	33	10.227	152.063.418.000,00
165	Kab. Sumedang	751	169	60	980	2.919	967	-	3.886	78.983.844.000,00
166	Kab. Tasikmalaya	417	43	20	480	6.199	909	123	7.231	95.230.674.000,00
167	Kota Bandung	775	398	88	1.261	2.753	1.511	-	4.264	93.816.684.000,00
168	Kota Bekasi	1.313	299	230	1.842	4.849	1.175	94	6.118	135.868.188.000,00
169	Kota Bogor	584	105	37	723	2.518	4	-	2.522	54.609.792.000,00
170	Kota Cirebon	324	78	-	402	764	15	-	779	23.748.522.000,00
171	Kota Depok	767	267	38	1.072	3.762	2	-	3.764	81.231.672.000,00
172	Kota Sukabumi	116	-	-	116	547	856	64	1.467	20.037.666.000,00
173	Kota Tasikmalaya	366	70	29	465	1.031	1.113	16	2.160	40.832.460.000,00
174	Kota Cimahi	514	50	43	607	377	10	-	387	27.461.974.000,00
175	Kota Banjar	102	225	142	469	243	460	-	703	25.521.894.000,00
176	Kab. Bandung Barat	431	113	53	597	2.117	17	-	2.134	45.639.552.000,00
177	Kab. Pangandaran	335	-	-	335	1.367	184	-	1.551	29.362.494.000,00
178	Provinsi Jawa Tengah	4.352	145	224	4.721	6.951	1.642	532	9.125	278.649.018.000,00
179	Kab. Banjarnegara	386	61	59	506	2.785	578	48	3.411	55.689.402.000,00
180	Kab. Banyumas	1.987	24	19	2.010	4.686	358	236	5.280	133.443.000.000,00
181	Kab. Batang	815	45	46	906	2.051	8	24	2.083	36.997.210.000,00
182	Kab. Blora	1.261	250	401	1.912	2.063	123	-	2.186	96.850.728.000,00
183	Kab. Boyolali	366	45	21	432	2.164	31	16	2.211	40.103.010.000,00
184	Kab. Brebes	1.285	125	77	1.487	2.526	22	20	2.568	84.518.148.000,00
185	Kab. Cilacap	930	202	60	1.192	1.891	505	-	2.396	71.332.680.000,00
186	Kab. Demak	320	95	132	547	1.150	1.005	129	2.284	45.306.252.000,00
187	Kab. Grobogan	1.270	391	51	1.712	3.829	1.211	-	5.040	119.420.256.000,00
188	Kab. Jepara	550	-	-	550	1.081	205	-	1.286	34.829.004.000,00
189	Kab. Karanganyar	548	243	5	796	1.167	116	-	1.283	44.270.130.000,00
190	Kab. Kebumen	448	112	30	590	2.388	112	152	2.652	50.868.048.000,00
191	Kab. Kendal	1.058	190	80	1.328	996	153	2	1.151	63.355.338.000,00

7

No	Daerah	Jumlah Formasi PPPK 2022				Jumlah Formasi PPPK 2023				7 Bagian DAU Penggajian Formasi PPPK (dalam rupiah)
		Guru	Tenaga Kesehatan	Teknis	Total	Guru	Tenaga Kesehatan	Teknis	Total	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)	(xi)
192	Kab. Klates	585	89	75	749	3.002	50	-	3.052	61.236.420.000,00
193	Kab. Kudus	411	88	15	514	1.414	347	-	1.761	38.484.366.000,00
194	Kab. Magelang	897	106	49	1.052	1.493	136	-	1.629	37.800.622.000,00
195	Kab. Pac	665	184	-	849	2.055	207	-	2.262	56.702.160.000,00
196	Kab. Pekalongan	457	-	-	457	1.554	183	124	1.861	37.350.810.000,00
197	Kab. Pemalang	297	78	-	375	3.529	155	163	3.847	55.272.558.000,00
198	Kab. Purbalingga	173	2	24	199	1.398	532	83	2.013	29.029.074.000,00
199	Kab. Purworejo	1.133	44	75	1.252	1.641	-	51	1.692	66.170.904.000,00
200	Kab. Rembang	1.309	399	146	1.854	815	-	-	815	80.044.242.000,00
201	Kab. Semarang	1.618	412	411	2.441	1.479	187	-	1.666	111.680.952.000,00
202	Kab. Sragen	352	333	-	685	1.926	116	-	2.042	48.051.768.000,00
203	Kab. Sukoharjo	764	-	-	764	2.352	238	103	2.693	58.003.614.000,00
204	Kab. Tegal	1.466	39	144	1.649	3.794	30	35	3.859	104.246.838.000,00
205	Kab. Temanggung	622	3	35	660	918	104	61	1.083	36.910.242.000,00
206	Kab. Wonogiri	645	199	-	844	2.190	840	156	3.186	66.316.956.000,00
207	Kab. Wonorebo	803	174	79	1.056	1.244	119	-	1.363	55.131.330.000,00
208	Kota Magelang	96	104	93	293	341	19	-	360	15.103.884.000,00
209	Kota Pekalongan	117	25	4	146	331	21	39	391	9.772.242.000,00
210	Kota Salatiga	108	56	23	187	267	144	-	411	11.563.350.000,00
211	Kota Semarang	662	388	171	1.221	1.077	1.001	127	2.205	70.422.138.000,00
212	Kota Surakarta	297	277	50	624	699	184	-	883	33.401.154.000,00
213	Kota Tegal	429	289	177	895	285	102	-	387	38.572.278.000,00
214	Provinsi DI Yogyakarta	547	30	40	617	1.819	3	190	2.012	45.114.804.000,00
215	Kab. Bangul	396	104	10	510	1.566	32	24	1.622	36.854.988.000,00
216	Kab. Gunungkidul	236	199	-	435	1.024	24	-	1.048	27.874.452.000,00
217	Kab. Kulen Progo	205	150	36	391	1.008	52	108	1.168	27.453.780.000,00
218	Kab. Sleman	313	140	48	501	1.804	160	-	1.964	40.138.404.000,00
219	Kota Yogyakarta	189	39	23	251	456	35	63	554	15.545.664.000,00
220	Provinsi Jawa Timur	2.450	919	442	3.811	9.656	70	-	9.726	249.985.752.000,00
221	Kab. Bangkalan	818	185	60	1.063	3.158	11	-	3.169	74.569.770.000,00
222	Kab. Banguwangi	340	212	-	552	2.332	853	96	3.281	56.080.950.000,00
223	Kab. Blitar	663	-	-	663	2.005	337	144	2.486	51.917.208.000,00
224	Kab. Bojonegoro	3.942	854	11	4.807	4.129	39	-	4.168	229.347.108.000,00
225	Kab. Boodowoso	758	150	77	985	984	983	163	2.134	60.580.656.000,00
226	Kab. Gresik	556	64	-	620	1.427	1.105	82	2.614	51.619.956.000,00
227	Kab. Jember	793	-	-	793	2.787	82	-	2.869	60.588.410.000,00
228	Kab. Jombang	893	-	-	893	2.608	29	-	2.637	62.376.762.000,00
229	Kab. Kediri	824	150	27	1.001	1.049	1.043	-	5.092	92.592.996.000,00
230	Kab. Lamongan	980	939	-	1.919	2.630	1.136	-	3.766	113.869.176.000,00
231	Kab. Lumajang	284	274	62	620	3.339	960	-	4.299	69.504.346.000,00
232	Kab. Madiun	337	138	18	493	1.096	15	-	1.611	36.083.598.000,00
233	Kab. Magetan	469	286	22	777	1.911	13	-	1.924	50.342.052.000,00
234	Kab. Malang	1.616	903	266	2.785	5.292	167	-	5.459	165.186.606.000,00
235	Kab. Mojokerto	225	-	-	225	1.724	1.047	130	2.901	39.455.514.000,00
236	Kab. Nganjuk	828	290	-	1.118	2.819	205	10	3.034	75.254.820.000,00
237	Kab. Ngawi	1.373	175	27	1.575	2.014	30	-	2.044	82.345.116.000,00
238	Kab. Padas	352	32	-	384	1.197	13	43	1.213	27.661.854.000,00
239	Kab. Pamekasan	585	125	29	739	1.039	-	-	1.039	39.185.358.000,00
240	Kab. Pasuruan	328	210	120	658	1.763	804	-	2.567	52.584.402.000,00
241	Kab. Ponorogo	541	106	81	728	1.615	-	-	1.615	45.175.434.000,00

7

No	Daerah	Jumlah Formasi PPPK 2022				Jumlah Formasi PPPK 2023				*1 Bagian DAU Penggajian Formasi PPPK (dalam rupiah)
		Guru	Tenaga Kesehatan	Teknis	Total	Guru	Tenaga Kesehatan	Teknis	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
242	Kab. Probolinggo	838	194	152	1.184	917	339	-	1.256	58.924.656.000,00
243	Kab. Sampang	186	79	51	316	2.118	535	-	2.653	40.327.470.000,00
244	Kab. Sidoarjo	1.251	1.398	207	2.856	2.287	563	-	2.849	140.218.134.000,00
245	Kab. Situbondo	345	118	39	502	1.214	963	-	2.167	42.331.554.000,00
246	Kab. Sumenep	189	55	72	316	884	177	-	1.061	23.429.982.000,00
247	Kab. Trenggalek	975	426	205	1.606	1.718	622	-	2.340	86.680.608.000,00
248	Kab. Tuban	534	126	210	870	953	1.298	-	2.251	57.394.074.000,00
249	Kab. Tuhungagung	1.433	138	-	1.571	2.205	220	-	2.425	86.235.018.000,00
250	Kota Batar	119	77	32	228	302	97	-	399	13.014.810.000,00
251	Kota Kediri	224	-	-	224	743	498	80	1.321	22.646.886.000,00
252	Kota Madani	205	201	-	406	239	165	-	404	22.232.784.000,00
253	Kota Malang	301	26	20	347	200	74	178	452	18.159.804.000,00
254	Kota Mojokerto	168	-	-	168	176	245	47	468	11.436.696.000,00
255	Kota Pasuruan	163	70	170	403	142	94	-	236	18.023.628.000,00
256	Kota Probolinggo	88	100	17	205	187	292	-	479	12.978.246.000,00
257	Kota Surabaya	1.513	369	-	1.882	3.391	1.736	-	5.127	126.890.034.000,00
258	Kota Batu	78	14	-	92	215	1	-	216	5.835.360.000,00
259	Provinsi Kalimantan Barat	1.333	151	293	1.777	5.822	62	-	5.884	130.881.492.000,00
260	Kab. Bengkayang	366	250	38	654	2.060	493	-	2.553	82.281.774.000,00
261	Kab. Landak	271	37	-	298	3.702	155	7	3.864	52.487.880.000,00
262	Kab. Kapuas Hulu	110	183	81	374	1.315	658	-	1.973	35.343.414.000,00
263	Kab. Ketapang	2.919	500	78	3.497	1.171	1.294	-	2.465	160.825.986.000,00
264	Kab. Mempawah	474	122	8	604	786	-	-	786	31.601.436.000,00
265	Kab. Sambas	-	270	8	278	1.739	443	9	2.211	34.173.778.000,00
266	Kab. Sanggau	150	285	42	477	1.822	292	-	2.114	40.806.312.000,00
267	Kab. Sintang	600	100	23	723	3.709	283	31	4.023	70.541.406.000,00
268	Kota Pontianak	436	50	67	553	1.699	143	83	1.925	41.726.874.000,00
269	Kota Singkawang	284	101	111	496	465	-	-	465	24.035.478.000,00
270	Kab. Sekadau	158	40	29	227	1.816	284	-	2.070	30.712.296.000,00
271	Kab. Melawi	-	-	-	-	827	349	18	1.194	12.673.116.000,00
272	Kab. Kayung Utara	194	193	171	558	621	140	-	761	29.564.718.000,00
273	Kab. Kubu Raya	262	52	12	326	2.663	4	-	2.669	40.882.374.000,00
274	Provinsi Kalimantan Tengah	-	-	-	-	1.379	116	-	1.495	15.867.930.000,00
275	Kab. Barito Selatan	458	-	-	458	603	83	58	746	25.439.184.000,00
276	Kab. Barito Utara	568	150	156	874	555	432	-	987	44.132.010.000,00
277	Kab. Kapuas	88	87	19	194	3.006	564	-	3.570	45.262.532.000,00
278	Kab. Kotawaringin Barat	200	69	14	283	1.074	209	-	1.283	24.513.526.000,00
279	Kab. Kotawaringin Timur	496	418	96	1.010	2.166	630	-	2.796	68.569.824.000,00
280	Kota Palangkaraya	90	24	98	212	448	23	7	478	13.237.188.000,00
281	Kab. Katingan	987	-	-	987	841	2	25	868	47.220.348.000,00
282	Kab. Seruyan	-	16	7	23	719	209	-	928	10.735.476.000,00
283	Kab. Sukamara	69	76	103	248	137	35	-	172	11.375.592.000,00
284	Kab. Lamandau	50	25	-	75	828	30	11	869	12.111.666.000,00
285	Kab. Gunung Mas	1.495	449	25	1.969	43	-	-	43	76.278.654.000,00
286	Kab. Pulang Pisau	-	-	-	-	111	-	-	111	1.178.154.000,00
287	Kab. Murung Raya	1.172	100	63	1.335	1.227	237	-	1.464	66.947.076.000,00
288	Kab. Barito Timur	-	-	-	-	76	-	-	76	806.664.000,00
289	Provinsi Kalimantan Selatan	552	591	194	1.337	2.166	1.071	-	3.237	85.842.714.000,00
290	Kab. Banjar	626	400	-	1.026	1.386	105	-	1.491	55.334.682.000,00
291	Kab. Barito Kuala	663	36	33	732	401	286	-	687	35.479.674.000,00

7

No	Daerah	Jumlah Formasi PPPK 2022				Jumlah Formasi PPPK 2023				*) Bagian DAU/ Penggajian Formasi PPPK (dalam rupiah)
		Guru	Tenaga Kesehatan	Teknis	Total	Guru	Tenaga Kesehatan	Teknis	Total	
290	Kab. Hulu Sungai Selatan	299	119	73	491	233	324	-	557	24.819.426.000,00
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	384	319	38	741	629	322	-	951	38.628.342.000,00
294	Kab. Hulu Sungai Utara	117	38	-	155	400	395	35	830	14.778.360.000,00
295	Kab. Kotabaru	100	100	68	268	1.883	358	-	2.241	34.106.118.000,00
296	Kab. Tabalong	440	149	45	634	667	87	-	754	32.417.028.000,00
297	Kab. Tanah Laut	201	65	13	279	964	1.960	-	2.924	41.779.068.000,00
298	Kab. Tapin	177	100	28	305	392	234	-	626	18.389.304.000,00
299	Kota Banjarbaru	92	58	54	204	466	10	-	476	12.907.896.000,00
300	Kota Banjarmasin	422	92	69	583	822	943	-	1.765	41.183.874.000,00
301	Kab. Balangan	289	66	16	371	389	9	-	398	18.510.840.000,00
302	Kab. Tanah Bumbu	56	-	-	56	1.387	592	32	1.911	22.439.802.000,00
303	Provinsi Kalimantan Timur	844	498	75	1.417	2.279	-	-	2.279	78.755.142.000,00
304	Kab. Berau	795	806	114	1.715	67	422	-	489	71.231.466.000,00
305	Kab. Kutai Kartanegara	-	-	-	-	2.297	2.159	186	4.642	49.270.188.000,00
306	Kab. Kutai Barat	1.514	635	38	2.187	79	-	-	79	85.055.502.000,00
307	Kab. Kutai Timur	1.206	476	317	1.999	1.135	298	-	1.433	92.187.354.000,00
308	Kab. Paser	155	76	33	264	1.809	14	-	1.823	29.515.434.000,00
309	Kota Balikpapan	727	82	47	856	1.155	144	-	1.299	46.750.434.000,00
310	Kota Bontang	150	153	308	611	122	75	-	197	25.619.346.000,00
311	Kota Samarinda	637	70	28	735	2.323	325	29	2.677	86.717.058.000,00
312	Kab. Penajam Paser Utara	322	178	70	570	218	45	-	263	24.741.042.000,00
313	Kab. Mahakam Ulu	275	141	58	474	55	119	-	174	20.099.628.000,00
314	Provinsi Sulawesi Utara	3.279	693	622	4.594	1.303	254	-	1.557	193.431.750.000,00
315	Kab. Bolaang Mongondow	621	109	-	730	1.201	49	-	1.250	41.378.340.000,00
316	Kab. Minahasa	688	99	-	787	807	326	-	1.133	42.331.458.000,00
317	Kab. Kepulauan Sangihe	268	200	-	588	489	117	-	606	29.074.788.000,00
318	Kota Bitung	196	76	-	272	181	46	-	227	12.883.354.000,00
319	Kota Manado	465	392	325	1.182	486	53	-	539	51.237.402.000,00
320	Kab. Kepulauan Talaud	183	-	-	183	175	729	29	933	16.949.826.000,00
321	Kab. Minahasa Selatan	168	68	338	574	830	165	-	995	32.664.522.000,00
322	Kota Tomohon	136	118	99	353	55	45	-	100	14.654.724.000,00
323	Kab. Minahasa Utara	500	-	-	500	544	165	-	709	26.779.326.000,00
324	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	137	119	50	306	166	-	-	166	13.545.372.000,00
325	Kota Kotamobagu	80	-	-	80	347	46	23	416	6.340.824.000,00
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	222	75	-	297	166	-	-	166	13.198.800.000,00
327	Kab. Minahasa Tenggara	50	-	-	50	375	83	14	472	6.035.208.000,00
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	287	356	46	689	129	327	-	456	31.371.996.000,00
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	212	75	-	287	121	370	17	508	16.443.708.000,00
330	Provinsi Sulawesi Tengah	5.309	384	204	5.897	136	79	-	215	229.363.686.000,00
331	Kab. Donggala	250	151	66	467	1.786	926	40	2.752	47.192.964.000,00
332	Kab. Banggai Kepulauan	1.017	211	149	1.377	37	150	-	187	85.010.334.000,00
333	Kab. Buana	669	324	98	1.091	397	401	-	798	50.482.200.000,00
334	Kab. Tali Toli	250	150	134	534	1.307	550	-	1.857	40.273.470.000,00
335	Kab. Donggala	250	350	-	600	2.062	460	72	2.594	50.637.516.000,00
336	Kab. Morowali	740	531	96	1.367	428	691	-	1.119	64.517.502.000,00
337	Kab. Poso	551	-	-	551	631	-	-	631	27.915.342.000,00
338	Kota Palu	429	133	70	632	211	558	-	769	32.499.222.000,00
339	Kab. Parigi Moutong	-	-	-	-	1.158	1.077	63	2.298	24.390.972.000,00
340	Kab. Tojo Una-Una	375	50	-	425	894	796	-	1.690	34.303.560.000,00
341	Kab. Sigi	508	592	-	1.100	611	602	60	1.273	58.870.422.000,00

7

No	Daerah	Jumlah Formasi PPPK 2022				Jumlah Formasi PPPK 2023				*1 Bagian DAU Penggajian Formasi PPPK (dalam rupiah)
		Guru	Tenaga Kesehatan	Teknis	Total	Guru	Tenaga Kesehatan	Teknis	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
342	Kab. Banggai Laut	507	137	46	690	22	24	-	46	27.058.764.000,00
343	Kab. Morowali Utara	416	300	-	716	66	472	-	538	33.282.060.000,00
344	Provinsi Sulawesi Selatan	10.385	29	-	10.414	3.465	35	301	3.801	441.366.126.000,00
345	Kab. Bantaeng	105	-	-	105	237	627	-	864	13.213.836.000,00
346	Kab. Barru	151	36	23	210	629	9	-	638	14.858.412.000,00
347	Kab. Bone	1.915	-	-	1.915	1.282	31	-	1.313	87.679.002.000,00
348	Kab. Bulukumba	-	-	-	-	1.411	12	86	1.509	16.016.326.000,00
349	Kab. Enrekang	365	316	38	719	455	426	-	881	37.038.186.000,00
350	Kab. Gowa	731	149	45	925	3.292	1.052	50	4.394	82.373.340.000,00
351	Kab. Jeneponto	271	62	35	368	1.543	4	-	1.547	30.590.802.000,00
352	Kab. Luwu	61	25	56	142	1.748	14	-	1.762	24.170.004.000,00
353	Kab. Luwu Utara	361	20	-	381	1.808	94	11	1.913	34.976.130.000,00
354	Kab. Maros	254	55	45	354	1.019	10	-	1.029	24.553.638.000,00
355	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	-	10	-	10	573	1.291	54	1.918	20.742.732.000,00
356	Kota Palopo	-	-	-	-	284	200	30	514	5.455.596.000,00
357	Kab. Luwu Timur	556	319	71	946	152	277	-	429	40.981.974.000,00
358	Kab. Pinrang	203	75	28	306	1.451	187	8	1.646	29.254.092.000,00
359	Kab. Sinjai	-	-	-	-	584	8	33	625	6.633.750.000,00
360	Kab. Kepulauan Selayar	264	100	-	364	245	75	-	320	17.413.392.000,00
361	Kab. Sidrap	-	-	-	-	1.376	745	54	2.175	23.085.450.000,00
362	Kab. Soppeng	-	-	-	-	817	286	72	1.175	12.471.450.000,00
363	Kab. Takalar	-	-	-	-	1.226	20	51	1.297	13.766.358.000,00
364	Kab. Tana Toraja	477	200	37	714	785	224	-	1.007	38.183.010.000,00
365	Kab. Wajo	70	52	47	169	2.433	-	-	2.433	32.331.714.000,00
366	Kota Pare Pare	-	-	-	-	224	-	-	224	2.377.336.000,00
367	Kota Makassar	695	-	54	749	2.898	1	21	2.920	59.835.372.000,00
368	Kab. Toraja Utara	567	546	-	1.113	816	559	42	1.417	57.899.442.000,00
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	4.373	112	107	4.592	671	-	-	671	183.950.730.000,00
370	Kab. Buton	446	373	105	924	283	374	18	675	42.745.842.000,00
371	Kab. Konawe	886	1.608	80	2.574	666	1.438	-	2.104	121.451.448.000,00
372	Kab. Kolaka	165	86	48	299	1.104	605	-	1.709	29.633.218.000,00
373	Kab. Muna	202	70	23	295	943	330	-	1.293	25.083.762.000,00
374	Kota Kendari	731	-	-	731	691	629	77	1.397	42.977.106.000,00
375	Kota Bau Bau	-	-	-	-	335	-	-	335	3.585.690.000,00
376	Kab. Konawe Selatan	-	-	-	-	628	-	-	628	6.665.592.000,00
377	Kab. Bombana	451	217	56	724	436	124	-	560	33.823.632.000,00
378	Kab. Wakatobi	324	41	27	392	179	245	-	424	19.595.472.000,00
379	Kab. Kolaka Utara	50	53	36	139	212	466	-	678	12.548.904.000,00
380	Kab. Konawe Utara	219	-	-	219	519	349	8	876	17.731.116.000,00
381	Kab. Buton Utara	254	211	28	493	302	150	-	452	23.781.972.000,00
382	Kab. Konawe Kepulauan	242	196	34	472	7	227	-	234	19.889.292.000,00
383	Kab. Kolaka Timur	778	283	-	1.061	30	220	-	250	43.510.488.000,00
384	Kab. Muna Barat	124	99	34	257	629	275	11	915	19.608.366.000,00
385	Kab. Buton Tengah	183	150	22	355	36	66	-	102	14.752.968.000,00
386	Kab. Buton Selatan	322	16	-	338	333	162	-	495	38.269.634.000,00
387	Provinsi Bali	1.473	324	17	1.814	2.033	590	347	2.970	101.377.092.000,00
388	Kab. Badung	2.691	784	-	3.475	3.060	804	165	4.029	176.579.106.000,00
389	Kab. Bangli	58	-	-	58	287	303	67	657	9.206.862.000,00
390	Kab. Buleleng	843	403	141	1.387	1.639	969	-	2.608	81.091.908.000,00
391	Kab. Gianyar	843	157	-	1.000	985	-	-	985	48.962.790.000,00

7

No	Daerah	Jumlah Formasi PPPK 2022				Jumlah Formasi PPPK 2023				% Bagian DAU Penggajian Formasi PPPK (dalam rupiah)
		Guru	Tenaga Kesehatan	Teknis	Total	Guru	Tenaga Kesehatan	Teknis	Total	
392	Kab. Jember	349	66	30	445	785	413	-	1.168	29.533.212.000,00
393	Kab. Karangasem	-	-	-	-	727	556	-	1.283	13.617.762.000,00
394	Kab. Klungkang	14	-	-	14	346	250	71	667	7.618.650.000,00
395	Kab. Teboman	527	-	-	527	1.157	1.072	144	2.373	45.480.738.000,00
396	Kota Denpasar	341	-	-	341	1.482	605	105	2.194	36.418.394.000,00
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	3.412	446	204	4.062	152	704	-	856	165.505.080.000,00
398	Kab. Bima	373	90	86	549	2.357	630	-	2.987	52.844.910.000,00
399	Kab. Dompu	301	-	-	301	987	631	65	1.683	29.454.270.000,00
400	Kab. Lombok Barat	172	110	2	284	555	706	-	1.261	24.320.526.000,00
401	Kab. Lombok Tengah	742	109	89	940	1.542	1.031	-	2.573	63.507.342.000,00
402	Kab. Lombok Timur	2.057	255	85	2.397	356	1.080	-	1.436	107.545.380.000,00
403	Kab. Sumbawa	1.296	150	139	1.585	490	566	-	1.056	72.243.564.000,00
404	Kota Mataram	263	50	-	313	545	109	-	654	18.594.560.000,00
405	Kota Bima	152	51	72	275	202	198	-	400	14.835.300.000,00
406	Kab. Sumbawa Barat	202	128	221	551	74	494	-	568	27.246.660.000,00
407	Kab. Lombok Utara	204	28	16	248	243	563	-	806	18.104.868.000,00
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	219	-	-	219	2.324.466.000,00
409	Kab. Alor	221	199	8	428	1.145	-	-	1.145	28.634.454.000,00
410	Kab. Belu	519	174	148	841	451	207	-	658	39.369.240.000,00
411	Kab. Ende	1.401	227	169	1.797	959	181	-	1.140	81.298.836.000,00
412	Kab. Flores Timur	319	225	154	698	228	-	-	228	29.298.376.000,00
413	Kab. Kupang	-	-	-	-	1.211	327	-	1.538	16.324.332.000,00
414	Kab. Lembata	317	130	50	497	192	77	-	269	21.993.642.000,00
415	Kab. Manggarai	772	200	5	977	341	118	-	459	42.494.142.000,00
416	Kab. Ngada	482	-	-	482	159	633	-	792	26.957.144.000,00
417	Kab. Sikka	861	237	148	1.246	252	52	-	304	51.207.624.000,00
418	Kab. Sumba Barat	607	319	79	1.005	131	90	-	221	41.046.234.000,00
419	Kab. Sumba Timur	2.190	200	110	2.500	600	10	-	610	102.744.540.000,00
420	Kab. Timor Tengah Selatan	3.445	90	86	3.621	1.354	19	-	1.373	154.010.490.000,00
421	Kab. Timor Tengah Utara	794	465	61	1.320	298	30	-	328	54.311.592.000,00
422	Kota Kupang	495	-	-	495	350	237	-	587	25.291.878.000,00
423	Kab. Rote Ndao	526	389	5	920	232	180	-	412	39.800.328.000,00
424	Kab. Manggarai Barat	550	550	226	1.326	1.110	575	-	1.685	68.946.108.000,00
425	Kab. Nagekeo	304	59	55	418	53	-	-	53	16.658.886.000,00
426	Kab. Sumba Barat Daya	110	100	64	274	565	108	-	673	17.694.414.000,00
427	Kab. Sumba Tengah	501	192	435	1.128	51	-	-	51	43.978.338.000,00
428	Kab. Manggarai Timur	276	570	-	846	1.691	188	-	2.079	54.644.274.000,00
429	Kab. Sabu Raijua	115	301	148	564	74	166	-	240	24.265.872.000,00
430	Kab. Malaka	280	85	14	379	407	404	-	811	23.202.486.000,00
431	Provinsi Maluku	1.803	146	259	2.208	1.791	44	-	1.835	104.502.354.000,00
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	358	257	98	713	207	193	-	400	31.701.804.000,00
433	Kab. Maluku Tengah	413	97	51	561	1.184	-	-	1.184	34.169.964.000,00
434	Kab. Maluku Tenggara	312	146	224	682	39	591	-	630	32.949.276.000,00
435	Kab. Buru	553	359	86	998	230	309	-	539	44.151.930.000,00
436	Kota Ambon	942	210	-	1.152	170	134	-	304	47.587.872.000,00
437	Kab. Seram Bagian Barat	125	75	52	252	188	170	-	358	13.503.828.000,00
438	Kab. Seram Bagian Timur	599	100	-	699	254	1.136	9	1.399	41.766.078.000,00
439	Kab. Kepulauan Aru	469	404	175	1.048	23	332	-	355	44.124.354.000,00
440	Kota Tual	372	417	67	856	19	418	-	437	37.601.166.000,00
441	Kab. Maluku Barat Daya	650	250	103	1.003	118	153	-	271	41.499.918.000,00

7

No	Daerah	Jumlah Formasi PPPK 2022				Jumlah Formasi PPPK 2023				*) Bagian DAU Penggajian Formasi PPPK (dalam rupiah)
		Guru	Tenaga Kesehatan	Teknis	Total	Guru	Tenaga Kesehatan	Teknis	Total	
442	Kab. Buru Selatan	882	486	-	1.368	14	716	-	730	60.427.164.000,00
443	Provinsi Papua	-	-	-	-	406	11	96	512	5.438.497.000,00
444	Kab. Mamberamo	109	-	-	109	491	204	53	750	12.157.872.000,00
445	Kab. Jayapura	193	184	-	377	358	11	63	432	19.102.764.000,00
446	Kab. Kepulauan Yapen	-	-	-	-	29	254	-	283	3.003.762.000,00
447	Kota Jayapura	-	-	-	-	53	-	-	53	562.542.000,00
448	Kab. Sarmi	-	-	-	-	133	89	18	240	2.547.360.000,00
449	Kab. Koro	145	-	-	145	107	131	23	261	8.353.914.000,00
450	Kab. Waropen	-	-	-	-	150	2	8	160	1.698.240.000,00
451	Kab. Supiori	-	-	-	-	158	72	9	239	2.536.746.000,00
452	Kab. Mamberamo Raya	-	-	-	-	153	2	11	166	1.761.924.000,00
453	Provinsi Maluku Utara	2.536	269	107	2.912	392	143	-	535	117.813.786.000,00
454	Kab. Halmahera Tengah	429	388	36	853	11	389	-	400	37.092.924.000,00
455	Kota Ternate	100	44	5	149	224	528	-	752	13.719.420.000,00
456	Kab. Halmahera Barat	329	-	-	329	98	318	-	416	17.084.556.000,00
457	Kab. Halmahera Timur	642	177	14	833	172	310	-	482	37.193.112.000,00
458	Kab. Halmahera Selatan	801	1.060	136	1.997	32	402	-	434	81.506.852.000,00
459	Kab. Halmahera Utara	910	211	60	1.181	36	166	-	222	47.834.256.000,00
460	Kab. Kepulauan Sula	35	50	-	85	520	279	13	812	11.891.748.000,00
461	Kota Tidore Kepulauan	302	-	-	302	62	362	-	424	16.129.752.000,00
462	Kab. Pulau Morotai	368	-	-	368	10	-	-	10	14.277.084.000,00
463	Kab. Pulau Taka	808	100	19	927	141	114	-	255	38.403.486.000,00
464	Provinsi Banten	900	140	55	695	5.344	668	-	6.012	90.574.428.000,00
465	Kab. Lebak	1.501	723	-	2.224	2.129	738	118	2.985	117.324.582.000,00
466	Kab. Pandeglang	1.942	456	71	2.469	1.306	667	-	1.973	116.017.674.000,00
467	Kab. Serang	-	-	-	-	1.709	982	-	2.691	28.562.274.000,00
468	Kab. Tangerang	478	-	-	478	5.135	366	-	5.501	76.794.438.000,00
469	Kota Cilegon	626	253	183	1.064	467	207	-	674	48.126.348.000,00
470	Kota Tangerang	-	-	-	-	400	68	-	468	4.967.352.000,00
471	Kota Serang	1.465	34	24	1.523	279	-	-	279	61.608.990.000,00
472	Kota Tangerang Selatan	1.235	1.307	-	2.542	540	1.017	-	1.557	114.413.334.000,00
473	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	340	37	33	410	990	69	10	1.069	27.134.646.000,00
474	Kab. Bangka	235	49	100	384	1.358	269	-	1.627	32.056.060.000,00
475	Kab. Belitung	99	21	51	171	554	254	-	808	15.160.980.000,00
476	Kota Pangkal Pinang	118	12	-	130	329	133	26	488	10.185.672.000,00
477	Kab. Bangka Selatan	104	50	6	160	736	240	17	993	16.700.982.000,00
478	Kab. Bangka Tengah	128	47	44	219	436	-	-	436	13.060.956.000,00
479	Kab. Bangka Barat	207	30	56	293	1.004	101	-	1.105	23.011.314.000,00
480	Kab. Belitung Timur	140	136	109	385	517	-	-	517	18.190.218.000,00
481	Provinsi Gorontalo	1.637	113	12	1.764	116	-	-	116	69.929.496.000,00
482	Kab. Gorontalo	399	226	-	625	288	76	-	364	27.930.990.000,00
483	Kab. Gorontalo	70	170	-	240	931	185	70	1.186	21.830.124.000,00
484	Kota Gorontalo	70	66	44	180	407	237	-	674	14.085.276.000,00
485	Kab. Pohuwato	285	330	-	615	264	290	-	554	29.362.576.000,00
486	Kab. Bone Bolango	120	50	-	170	261	330	29	620	13.127.040.000,00
487	Kab. Gorontalo Utara	782	576	211	1.569	31	165	-	196	62.499.396.000,00
488	Provinsi Kepulauan Riau	718	64	37	819	1.552	47	-	1.599	48.509.838.000,00
489	Kab. Natuna	200	336	87	623	129	243	-	372	27.938.892.000,00
490	Kab. Kepulauan Anambas	219	151	91	461	124	93	-	217	20.055.426.000,00
491	Kab. Karimun	765	67	324	1.156	436	40	-	476	49.587.512.000,00

7

No	Daerah	Jumlah Formasi PPPK 2022				Jumlah Formasi PPPK 2023				Tj Bagian DAU Penghasilan Formasi PPPK (dalam rupiah)
		Guru	Tenaga Kesehatan	Teknis	Total	Guru	Tenaga Kesehatan	Teknis	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
492	Kota Batam	1.603	410	514	2.527	534	169	-	703	104.771.358.000,00
493	Kota Tanjung Pinang	398	117	105	620	268	-	-	268	26.719.512.000,00
494	Kab. Lingga	399	-	-	399	243	46	14	303	18.580.734.000,00
495	Kab. Bintan	368	100	80	548	328	-	-	328	23.428.536.000,00
496	Provinsi Papua Barat	1.803	185	-	1.988	446	24	34	504	81.903.360.000,00
497	Kab. Fak Fak	394	-	-	394	131	331	31	493	20.404.854.000,00
498	Kab. Manokwari	-	-	-	-	199	846	40	1.085	11.516.190.000,00
499	Kab. Sorong	501	599	-	1.100	291	692	51	1.034	53.333.876.000,00
500	Kota Sorong	475	30	-	505	57	41	14	112	20.635.308.000,00
501	Kab. Raja Ampat	569	1.150	-	1.719	195	1.155	8	1.358	80.609.064.000,00
502	Kab. Serang Selatan	287	273	-	560	108	273	23	404	25.852.536.000,00
503	Kab. Teluk Dintuni	400	838	-	1.238	129	841	13	983	58.106.466.000,00
504	Kab. Teluk Wondama	-	-	-	-	132	491	9	632	6.708.048.000,00
505	Kab. Kaimana	493	293	-	786	165	292	9	466	35.213.412.000,00
506	Kab. Maybrat	-	-	-	-	60	1	12	73	774.822.000,00
507	Kab. Tambora	288	-	-	288	145	233	8	386	15.187.308.000,00
508	Kab. Manukwari Selatan	142	-	-	142	56	379	7	442	10.159.524.000,00
509	Kab. Pegunungan Arfak	-	-	-	-	164	3	5	172	1.825.608.000,00
510	Provinsi Sulawesi Barat	228	20	56	304	820	-	-	820	20.294.388.000,00
511	Kab. Majene	163	10	6	179	449	269	49	767	15.033.870.000,00
512	Kab. Mamuju	689	250	-	939	758	538	49	1.345	50.434.842.000,00
513	Kab. Polewali Mandar	364	100	21	485	2.118	419	-	2.537	37.902.498.000,00
514	Kab. Mamasa	-	248	-	248	882	125	22	1.029	20.471.790.000,00
515	Kab. Pasangkayu	60	30	-	90	691	320	-	1.211	16.319.274.000,00
516	Kab. Mamuju Tengah	100	448	-	548	376	520	14	910	30.761.124.000,00
517	Provinsi Kalimantan Utara	298	82	5	385	93	21	-	114	16.035.576.000,00
518	Kab. Bulungan	15	-	-	15	1.121	727	36	1.884	20.574.396.000,00
519	Kab. Malinau	673	226	32	931	25	-	-	25	35.883.250.000,00
520	Kab. Nunukan	69	150	86	305	675	524	27	1.226	24.737.704.000,00
521	Kota Tarakan	56	10	-	66	799	-	-	799	11.022.114.000,00
522	Kab. Tana Tidung	-	-	-	-	78	279	6	363	3.852.882.000,00
523	Provinsi Papua Selatan***	-	-	-	-	243	7	57	307	3.255.124.000,00
524	Kab. Merauke	-	-	-	-	423	-	-	423	4.489.722.000,00
525	Kab. Boven Digoel	-	-	-	-	439	94	15	548	5.816.472.000,00
526	Kab. Mappi	-	-	-	-	707	87	29	823	8.735.322.000,00
527	Kab. Asmat	-	-	-	-	810	19	-	829	8.799.006.000,00
528	Provinsi Papua Tengah***	-	-	-	-	245	7	58	309	3.284.454.000,00
529	Kab. Mimika	-	-	-	-	159	-	-	159	1.687.626.000,00
530	Kab. Nuro	351	560	-	911	394	585	46	1.025	45.960.138.000,00
531	Kab. Paniai	-	-	-	-	334	219	12	565	5.996.910.000,00
532	Kab. Puncak Jaya	-	-	-	-	192	3	4	199	2.112.186.000,00
533	Kab. Dogiyai	290	-	-	290	159	26	8	193	13.215.822.000,00
534	Kab. Puncak	65	177	-	242	176	148	7	331	12.832.170.000,00
535	Kab. Intan Jaya	-	-	-	-	63	39	6	108	1.146.312.000,00
536	Kab. Deiyai	202	-	-	202	61	1	4	66	8.479.140.000,00
537	Provinsi Papua Pegunungan***	-	-	-	-	218	6	52	276	2.923.981.000,00
538	Kab. Jayawijaya	330	376	-	706	188	194	27	409	31.527.774.000,00
539	Kab. Yahukimo	-	-	-	-	1.040	4	11	1.055	11.197.770.000,00
540	Kab. Pegunungan Bintang	-	-	-	-	456	524	9	989	10.497.246.000,00
541	Kab. Tolikara	-	-	-	-	693	69	11	773	8.204.622.000,00

7

No	Daerah	Jumlah Formasi PPPK 2022				Jumlah Formasi PPPK 2023				*) Bagian DAU Penggajian Formasi PPPK (dalam rupiah)
		Guru	Tenaga Kesehatan	Teknis	Total	Guru	Tenaga Kesehatan	Teknis	Total	
(II)	(I)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
542	Kab. Mamberamo Tengah	140	-	-	140	139	94	8	241	7.949.094.000,00
543	Kab. Yalimo	-	-	-	-	131	2	6	139	1.475.346.000,00
544	Kab. Lanny Jaya	259	-	-	259	271	2	6	279	12.934.878.000,00
545	Kab. Nduga	75	-	-	75	46	-	-	46	3.376.344.000,00

Keterangan:

- Bagian DAU Penggajian Formasi PPPK untuk Formasi PPPK tahun 2022 dihitung sebanyak 9 bulan gaji dan tunjangan melekat, ditambah gaji dan tunjangan melekat untuk gaji ke-13 dan gaji dan tunjangan melekat Tunjangan Hari Raya;
- Bagian DAU Penggajian Formasi PPPK untuk Formasi PPPK tahun 2023 dihitung sebanyak 3 bulan gaji dan tunjangan melekat; dan
- Bagian DAU Penggajian Formasi PPPK untuk Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan dihitung secara proporsional dari kebutuhan penggajian Formasi PPPK Provinsi Papua.

7

B. RINCIAN JUMLAH KELURAHAN DAN PAGU BAGIAN DAU PENDANAAN
KELURAHAN PER DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Daerah	Jumlah Kelurahan	Dukungan Pendanaan Kelurahan Dalam DAU 2023 (dalam rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Provinsi Aceh	-	-
2	Kab. Aceh Barat	-	-
3	Kab. Aceh Besar	-	-
4	Kab. Aceh Selatan	-	-
5	Kab. Aceh Singkil	-	-
6	Kab. Aceh Tengah	-	-
7	Kab. Aceh Tenggara	-	-
8	Kab. Aceh Timur	-	-
9	Kab. Aceh Utara	-	-
10	Kab. Bireuen	-	-
11	Kab. Pidie	-	-
12	Kab. Simeulue	-	-
13	Kota Banda Aceh	-	-
14	Kota Sabang	-	-
15	Kota Langsa	-	-
16	Kota Lhokseumawe	-	-
17	Kab. Gayo Lues	-	-
18	Kab. Aceh Barat Daya	-	-
19	Kab. Aceh Jaya	-	-
20	Kab. Nagan Raya	-	-
21	Kab. Aceh Tamiang	-	-
22	Kab. Bener Meriah	-	-
23	Kab. Pidie Jaya	-	-
24	Kota Subulussalam	-	-
25	Provinsi Sumatera Utara	-	-
26	Kab. Asahan	27	5.400.000.000
27	Kab. Dairi	8	1.600.000.000
28	Kab. Deli Serdang	14	2.800.000.000
29	Kab. Karo	10	2.000.000.000
30	Kab. Labuhanbatu	23	4.600.000.000
31	Kab. Langkat	37	7.400.000.000
32	Kab. Mandailing Natal	27	5.400.000.000
33	Kab. Nias	-	-
34	Kab. Simalungun	27	5.400.000.000
35	Kab. Tapanuli Selatan	37	7.400.000.000
36	Kab. Tapanuli Tengah	56	11.200.000.000
37	Kab. Tapanuli Utara	11	2.200.000.000
38	Kab. Toba	13	2.600.000.000
39	Kota Binjai	37	7.400.000.000
40	Kota Medan	151	30.200.000.000
41	Kota Pematang Siantar	53	10.600.000.000
42	Kota Sibolga	17	3.400.000.000
43	Kota Tanjung Balai	31	6.200.000.000
44	Kota Tebing Tinggi	35	7.000.000.000
45	Kota Padangsidimpuan	37	7.400.000.000
46	Kab. Pakpak Bharat	-	-
47	Kab. Nias Selatan	2	400.000.000
48	Kab. Humbang Hasundutan	1	200.000.000
49	Kab. Serdang Bedagai	6	1.200.000.000

7

No.	Daerah	Jumlah Kelurahan	Dukungan Pendanaan Kelurahan Dalam DAU 2023 (dalam rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
50	Kab. Samosir	6	1.200.000.000
51	Kab. Batu Bara	10	2.000.000.000
52	Kab. Padang Lawas	1	200.000.000
53	Kab. Padang Lawas Utara	2	400.000.000
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	2	400.000.000
55	Kab. Labuhanbatu Utara	8	1.600.000.000
56	Kab. Nias Utara	1	200.000.000
57	Kab. Nias Barat	-	-
58	Kota Gunungsitoli	3	600.000.000
59	Provinsi Sumatera Barat	-	-
60	Kab. Lima Puluh Kota	-	-
61	Kab. Agam	-	-
62	Kab. Kepulauan Mentawai	-	-
63	Kab. Padang Pariaman	-	-
64	Kab. Pasaman	-	-
65	Kab. Pesisir Selatan	-	-
66	Kab. Sijunjung	-	-
67	Kab. Solok	-	-
68	Kab. Tanah Datar	-	-
69	Kota Bukit Tinggi	24	4.800.000.000
70	Kota Padang Panjang	16	3.200.000.000
71	Kota Padang	104	20.800.000.000
72	Kota Payakumbuh	47	9.400.000.000
73	Kota Sawahlunto	10	2.000.000.000
74	Kota Solok	13	2.600.000.000
75	Kota Pariaman	16	3.200.000.000
76	Kab. Pasaman Barat	-	-
77	Kab. Dharmasraya	-	-
78	Kab. Solok Selatan	-	-
79	Provinsi Riau	-	-
80	Kab. Bengkalis	19	3.800.000.000
81	Kab. Indragiri Hilir	39	7.800.000.000
82	Kab. Indragiri Hulu	16	3.200.000.000
83	Kab. Kampar	8	1.600.000.000
84	Kab. Kuantan Singingi	11	2.200.000.000
85	Kab. Pelalawan	14	2.800.000.000
86	Kab. Rokan Hilir	25	5.000.000.000
87	Kab. Rokan Hulu	6	1.200.000.000
88	Kab. Siak	9	1.800.000.000
89	Kota Dumai	36	7.200.000.000
90	Kota Pekanbaru	83	16.600.000.000
91	Kab. Kepulauan Meranti	5	1.000.000.000
92	Provinsi Jambi	-	-
93	Kab. Batanghari	14	2.800.000.000
94	Kab. Bungo	12	2.400.000.000
95	Kab. Kerinci	2	400.000.000
96	Kab. Merangin	10	2.000.000.000
97	Kab. Muaro Jambi	5	1.000.000.000
98	Kab. Sarolangun	9	1.800.000.000
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	20	4.000.000.000
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	20	4.000.000.000
101	Kab. Tebo	7	1.400.000.000

7

No.	Daerah	Jumlah Kelurahan	Dukungan Pendanaan Kelurahan Dalam DAU 2023 (dalam rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
102	Kota Jambi	62	12.400.000.000
103	Kota Sungai Penuh	4	800.000.000
104	Provinsi Sumatera Selatan	-	-
105	Kab. Lahat	18	3.600.000.000
106	Kab. Musi Banyuasin	13	2.600.000.000
107	Kab. Musi Rawas	13	2.600.000.000
108	Kab. Muara Enim	10	2.000.000.000
109	Kab. Ogan Komering Ilir	13	2.600.000.000
110	Kab. Ogan Komering Ulu	14	2.800.000.000
111	Kota Palembang	107	21.400.000.000
112	Kota Prabumulih	33	6.600.000.000
113	Kota Pagar Alam	35	7.000.000.000
114	Kota Lubuk Linggau	72	14.400.000.000
115	Kab. Banyuasin	17	3.400.000.000
116	Kab. Ogan Ilir	14	2.800.000.000
117	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	7	1.400.000.000
118	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	7	1.400.000.000
119	Kab. Empat Lawang	9	1.800.000.000
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	6	1.200.000.000
121	Kab. Musi Rawas Utara	7	1.400.000.000
122	Provinsi Bengkulu	-	-
123	Kab. Bengkulu Selatan	16	3.200.000.000
124	Kab. Bengkulu Utara	5	1.000.000.000
125	Kab. Rejang Lebong	34	6.800.000.000
126	Kota Bengkulu	67	13.400.000.000
127	Kab. Kaur	3	600.000.000
128	Kab. Seluma	20	4.000.000.000
129	Kab. Mukomuko	3	600.000.000
130	Kab. Lebong	11	2.200.000.000
131	Kab. Kepahiang	12	2.400.000.000
132	Kab. Bengkulu Tengah	1	200.000.000
133	Provinsi Lampung	-	-
134	Kab. Lampung Barat	5	1.000.000.000
135	Kab. Lampung Selatan	4	800.000.000
136	Kab. Lampung Tengah	10	2.000.000.000
137	Kab. Lampung Utara	15	3.000.000.000
138	Kab. Lampung Timur	-	-
139	Kab. Tanggamus	3	600.000.000
140	Kab. Tulang Bawang	4	800.000.000
141	Kab. Way Kanan	6	1.200.000.000
142	Kota Bandar Lampung	126	25.200.000.000
143	Kota Metro	22	4.400.000.000
144	Kab. Pesawaran	-	-
145	Kab. Pringsewu	5	1.000.000.000
146	Kab. Mesuji	-	-
147	Kab. Tulang Bawang Barat	3	600.000.000
148	Kab. Pesisir Barat	2	400.000.000
149	Provinsi DKI Jakarta*	267	22.179.718.000
150	Provinsi Jawa Barat	-	-
151	Kab. Bandung	10	2.000.000.000
152	Kab. Bekasi	7	1.400.000.000
153	Kab. Bogor	19	3.800.000.000

7

No.	Daerah	Jumlah Kelurahan	Dukungan Pendanaan Kelurahan Dalam DAU 2023 (dalam rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
154	Kab. Ciamis	7	1.400.000.000
155	Kab. Cianjur	6	1.200.000.000
156	Kab. Cirebon	12	2.400.000.000
157	Kab. Garut	21	4.200.000.000
158	Kab. Indramayu	8	1.600.000.000
159	Kab. Karawang	12	2.400.000.000
160	Kab. Kuningan	15	3.000.000.000
161	Kab. Majalengka	13	2.600.000.000
162	Kab. Purwakarta	9	1.800.000.000
163	Kab. Subang	8	1.600.000.000
164	Kab. Sukabumi	5	1.000.000.000
165	Kab. Sumedang	7	1.400.000.000
166	Kab. Tasikmalaya	-	-
167	Kota Bandung	151	30.200.000.000
168	Kota Bekasi	56	11.200.000.000
169	Kota Bogor	68	13.600.000.000
170	Kota Cirebon	22	4.400.000.000
171	Kota Depok	63	12.600.000.000
172	Kota Sukabumi	33	6.600.000.000
173	Kota Tasikmalaya	69	13.800.000.000
174	Kota Cimahi	15	3.000.000.000
175	Kota Banjar	9	1.800.000.000
176	Kab. Bandung Barat	-	-
177	Kab. Pangandaran	-	-
178	Provinsi Jawa Tengah	-	-
179	Kab. Banjarnegara	12	2.400.000.000
180	Kab. Banyumas	30	6.000.000.000
181	Kab. Batang	9	1.800.000.000
182	Kab. Blora	24	4.800.000.000
183	Kab. Boyolali	6	1.200.000.000
184	Kab. Brebes	5	1.000.000.000
185	Kab. Cilacap	15	3.000.000.000
186	Kab. Demak	6	1.200.000.000
187	Kab. Grobogan	7	1.400.000.000
188	Kab. Jepara	11	2.200.000.000
189	Kab. Karanganyar	15	3.000.000.000
190	Kab. Kebumen	11	2.200.000.000
191	Kab. Kendal	20	4.000.000.000
192	Kab. Klaten	10	2.000.000.000
193	Kab. Kudus	9	1.800.000.000
194	Kab. Magelang	5	1.000.000.000
195	Kab. Pati	5	1.000.000.000
196	Kab. Pekalongan	13	2.600.000.000
197	Kab. Pemalang	11	2.200.000.000
198	Kab. Purbalingga	15	3.000.000.000
199	Kab. Purworejo	25	5.000.000.000
200	Kab. Rembang	7	1.400.000.000
201	Kab. Semarang	27	5.400.000.000
202	Kab. Sragen	12	2.400.000.000
203	Kab. Sukoharjo	17	3.400.000.000
204	Kab. Tegal	6	1.200.000.000
205	Kab. Temanggung	23	4.600.000.000

7

No.	Daerah	Jumlah Kelurahan	Dukungan Pendanaan Kelurahan Dalam DAU 2023 (dalam rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
206	Kab. Wonogiri	43	8.600.000.000
207	Kab. Wonosobo	29	5.800.000.000
208	Kota Magelang	17	3.400.000.000
209	Kota Pekalongan	27	5.400.000.000
210	Kota Salatiga	23	4.600.000.000
211	Kota Semarang	177	35.400.000.000
212	Kota Surakarta	54	10.800.000.000
213	Kota Tegal	27	5.400.000.000
214	Provinsi DI Yogyakarta	-	-
215	Kab. Bantul	-	-
216	Kab. Gunungkidul	-	-
217	Kab. Kulon Progo	1	200.000.000
218	Kab. Sleman	-	-
219	Kota Yogyakarta	45	9.000.000.000
220	Provinsi Jawa Timur	-	-
221	Kab. Bangkalan	8	1.600.000.000
222	Kab. Banyuwangi	28	5.600.000.000
223	Kab. Blitar	28	5.600.000.000
224	Kab. Bojonegoro	11	2.200.000.000
225	Kab. Bondowoso	10	2.000.000.000
226	Kab. Gresik	26	5.200.000.000
227	Kab. Jember	22	4.400.000.000
228	Kab. Jombang	4	800.000.000
229	Kab. Kediri	1	200.000.000
230	Kab. Lamongan	12	2.400.000.000
231	Kab. Lumajang	7	1.400.000.000
232	Kab. Madiun	8	1.600.000.000
233	Kab. Magetan	28	5.600.000.000
234	Kab. Malang	12	2.400.000.000
235	Kab. Mojokerto	5	1.000.000.000
236	Kab. Nganjuk	20	4.000.000.000
237	Kab. Ngawi	4	800.000.000
238	Kab. Pacitan	5	1.000.000.000
239	Kab. Pamekasan	11	2.200.000.000
240	Kab. Pasuruan	24	4.800.000.000
241	Kab. Ponorogo	26	5.200.000.000
242	Kab. Probolinggo	5	1.000.000.000
243	Kab. Sampang	6	1.200.000.000
244	Kab. Sidoarjo	31	6.200.000.000
245	Kab. Situbondo	4	800.000.000
246	Kab. Sumenep	4	800.000.000
247	Kab. Trenggalek	5	1.000.000.000
248	Kab. Tuban	17	3.400.000.000
249	Kab. Tulungagung	14	2.800.000.000
250	Kota Blitar	21	4.200.000.000
251	Kota Kediri	46	9.200.000.000
252	Kota Madiun	27	5.400.000.000
253	Kota Malang	57	11.400.000.000
254	Kota Mojokerto	18	3.600.000.000
255	Kota Pasuruan	34	6.800.000.000
256	Kota Probolinggo	29	5.800.000.000
257	Kota Surabaya	154	30.800.000.000

7

No.	Daerah	Jumlah Kelurahan	Dukungan Pendanaan Kelurahan Dalam DAU 2023 (dalam rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
258	Kota Batu	5	1.000.000.000
259	Provinsi Kalimantan Barat	-	-
260	Kab. Bengkayang	2	400.000.000
261	Kab. Landak	-	-
262	Kab. Kapuas Hulu	4	800.000.000
263	Kab. Ketapang	9	1.800.000.000
264	Kab. Mempawah	7	1.400.000.000
265	Kab. Sambas	-	-
266	Kab. Sanggau	6	1.200.000.000
267	Kab. Sintang	16	3.200.000.000
268	Kota Pontianak	29	5.800.000.000
269	Kota Singkawang	26	5.200.000.000
270	Kab. Sekadau	-	-
271	Kab. Melawi	-	-
272	Kab. Kayong Utara	-	-
273	Kab. Kubu Raya	-	-
274	Provinsi Kalimantan Tengah	-	-
275	Kab. Barito Selatan	7	1.400.000.000
276	Kab. Barito Utara	10	2.000.000.000
277	Kab. Kapuas	17	3.400.000.000
278	Kab. Kotawaringin Barat	13	2.600.000.000
279	Kab. Kotawaringin Timur	17	3.400.000.000
280	Kota Palangkaraya	30	6.000.000.000
281	Kab. Katingan	7	1.400.000.000
282	Kab. Seruyan	3	600.000.000
283	Kab. Sukamara	3	600.000.000
284	Kab. Lamandau	3	600.000.000
285	Kab. Gunung Mas	13	2.600.000.000
286	Kab. Pulang Pisau	4	800.000.000
287	Kab. Murung Raya	9	1.800.000.000
288	Kab. Barito Timur	3	600.000.000
289	Provinsi Kalimantan Selatan	-	-
290	Kab. Banjar	13	2.600.000.000
291	Kab. Barito Kuala	6	1.200.000.000
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	4	800.000.000
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	8	1.600.000.000
294	Kab. Hulu Sungai Utara	5	1.000.000.000
295	Kab. Kotabaru	4	800.000.000
296	Kab. Tabalong	10	2.000.000.000
297	Kab. Tanah Laut	5	1.000.000.000
298	Kab. Tapin	9	1.800.000.000
299	Kota Banjarbaru	20	4.000.000.000
300	Kota Banjarmasin	52	10.400.000.000
301	Kab. Balangan	3	600.000.000
302	Kab. Tanah Bumbu	5	1.000.000.000
303	Provinsi Kalimantan Timur	-	-
304	Kab. Berau	10	2.000.000.000
305	Kab. Kutai Kartanegara	44	8.800.000.000
306	Kab. Kutai Barat	4	800.000.000
307	Kab. Kutai Timur	2	400.000.000
308	Kab. Paser	5	1.000.000.000
309	Kota Balikpapan	34	6.800.000.000

7

No.	Daerah	Jumlah Kelurahan	Dukungan Pendanaan Kelurahan Dalam DAU 2023 (dalam rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
310	Kota Bontang	15	3.000.000.000
311	Kota Samarinda	59	11.800.000.000
312	Kab. Penajam Paser Utara	24	4.800.000.000
313	Kab. Mahakam Ulu	-	-
314	Provinsi Sulawesi Utara	-	-
315	Kab. Bolaang Mongondow	2	400.000.000
316	Kab. Minahasa	43	8.600.000.000
317	Kab. Kepulauan Sangihe	22	4.400.000.000
318	Kota Bitung	69	13.800.000.000
319	Kota Manado	87	17.400.000.000
320	Kab. Kepulauan Talaud	11	2.200.000.000
321	Kab. Minahasa Selatan	10	2.000.000.000
322	Kota Tomohon	44	8.800.000.000
323	Kab. Minahasa Utara	6	1.200.000.000
324	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	10	2.000.000.000
325	Kota Kotamobagu	18	3.600.000.000
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	1	200.000.000
327	Kab. Minahasa Tenggara	9	1.800.000.000
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	-	-
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	-	-
330	Provinsi Sulawesi Tengah	-	-
331	Kab. Banggai	46	9.200.000.000
332	Kab. Banggai Kepulauan	3	600.000.000
333	Kab. Buol	7	1.400.000.000
334	Kab. Toli Toli	6	1.200.000.000
335	Kab. Donggala	9	1.800.000.000
336	Kab. Morowali	7	1.400.000.000
337	Kab. Poso	28	5.600.000.000
338	Kota Palu	46	9.200.000.000
339	Kab. Parigi Moutong	5	1.000.000.000
340	Kab. Tojo Una Una	12	2.400.000.000
341	Kab. Sigi	-	-
342	Kab. Banggai Laut	3	600.000.000
343	Kab. Morowali Utara	3	600.000.000
344	Provinsi Sulawesi Selatan	-	-
345	Kab. Bantaeng	21	4.200.000.000
346	Kab. Barru	15	3.000.000.000
347	Kab. Bone	44	8.800.000.000
348	Kab. Bulukumba	27	5.400.000.000
349	Kab. Enrekang	17	3.400.000.000
350	Kab. Gowa	46	9.200.000.000
351	Kab. Jeneponto	31	6.200.000.000
352	Kab. Luwu	20	4.000.000.000
353	Kab. Luwu Utara	7	1.400.000.000
354	Kab. Maros	23	4.600.000.000
355	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	38	7.600.000.000
356	Kota Palopo	48	9.600.000.000
357	Kab. Luwu Timur	3	600.000.000
358	Kab. Pinrang	40	8.000.000.000
359	Kab. Sinjai	13	2.600.000.000
360	Kab. Kepulauan Selayar	7	1.400.000.000
361	Kab. Sidenreng Rappang	38	7.600.000.000

7

No.	Daerah	Jumlah Kelurahan	Dukungan Pendanaan Kelurahan Dalam DAU 2023 (dalam rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
362	Kab. Soppeng	21	4.200.000.000
363	Kab. Takalar	24	4.800.000.000
364	Kab. Tana Toraja	47	9.400.000.000
365	Kab. Wajo	48	9.600.000.000
366	Kota Pare Pare	22	4.400.000.000
367	Kota Makassar	153	30.600.000.000
368	Kab. Toraja Utara	40	8.000.000.000
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	-	-
370	Kab. Buton	12	2.400.000.000
371	Kab. Konawe	57	11.400.000.000
372	Kab. Kolaka	35	7.000.000.000
373	Kab. Muna	26	5.200.000.000
374	Kota Kendari	65	13.000.000.000
375	Kota Bau Bau	43	8.600.000.000
376	Kab. Konawe Selatan	15	3.000.000.000
377	Kab. Bombana	22	4.400.000.000
378	Kab. Wakatobi	26	5.200.000.000
379	Kab. Kolaka Utara	6	1.200.000.000
380	Kab. Konawe Utara	11	2.200.000.000
381	Kab. Buton Utara	12	2.400.000.000
382	Kab. Konawe Kepulauan	7	1.400.000.000
383	Kab. Kolaka Timur	16	3.200.000.000
384	Kab. Muna Barat	5	1.000.000.000
385	Kab. Buton Tengah	10	2.000.000.000
386	Kab. Buton Selatan	10	2.000.000.000
387	Provinsi Bali	-	-
388	Kab. Badung	16	3.200.000.000
389	Kab. Bangli	4	800.000.000
390	Kab. Buleleng	19	3.800.000.000
391	Kab. Gianyar	6	1.200.000.000
392	Kab. Jembrana	10	2.000.000.000
393	Kab. Karangasem	3	600.000.000
394	Kab. Klungkung	6	1.200.000.000
395	Kab. Tabanan	-	-
396	Kota Denpasar	16	3.200.000.000
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	-
398	Kab. Bima	-	-
399	Kab. Dompu	9	1.800.000.000
400	Kab. Lombok Barat	3	600.000.000
401	Kab. Lombok Tengah	12	2.400.000.000
402	Kab. Lombok Timur	15	3.000.000.000
403	Kab. Sumbawa	8	1.600.000.000
404	Kota Mataram	50	10.000.000.000
405	Kota Bima	41	8.200.000.000
406	Kab. Sumbawa Barat	7	1.400.000.000
407	Kab. Lombok Utara	-	-
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	-	-
409	Kab. Alor	17	3.400.000.000
410	Kab. Belu	12	2.400.000.000
411	Kab. Ende	23	4.600.000.000
412	Kab. Flores Timur	21	4.200.000.000
413	Kab. Kupang	17	3.400.000.000

7

No.	Daerah	Jumlah Kelurahan	Dukungan Pendanaan Kelurahan Dalam DAU 2023 (dalam rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
414	Kab. Lembata	7	1.400.000.000
415	Kab. Manggarai	26	5.200.000.000
416	Kab. Ngada	16	3.200.000.000
417	Kab. Sikka	13	2.600.000.000
418	Kab. Sumba Barat	11	2.200.000.000
419	Kab. Sumba Timur	16	3.200.000.000
420	Kab. Timor Tengah Selatan	12	2.400.000.000
421	Kab. Timor Tengah Utara	33	6.600.000.000
422	Kota Kupang	51	10.200.000.000
423	Kab. Rote Ndao	7	1.400.000.000
424	Kab. Manggarai Barat	5	1.000.000.000
425	Kab. Nagekeo	16	3.200.000.000
426	Kab. Sumba Barat Daya	2	400.000.000
427	Kab. Sumba Tengah	-	-
428	Kab. Manggarai Timur	17	3.400.000.000
429	Kab. Sabu Raijua	5	1.000.000.000
430	Kab. Malaka	-	-
431	Provinsi Maluku	-	-
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	2	400.000.000
433	Kab. Maluku Tengah	6	1.200.000.000
434	Kab. Maluku Tenggara	1	200.000.000
435	Kab. Buru	-	-
436	Kota Ambon	20	4.000.000.000
437	Kab. Seram Bagian Barat	-	-
438	Kab. Seram Bagian Timur	-	-
439	Kab. Kepulauan Aru	2	400.000.000
440	Kota Tual	3	600.000.000
441	Kab. Maluku Barat Daya	1	200.000.000
442	Kab. Buru Selatan	-	-
443	Provinsi Papua	-	-
444	Kab. Biak Numfor	14	2.800.000.000
445	Kab. Jayapura	5	1.000.000.000
446	Kab. Kepulauan Yapen	5	1.000.000.000
447	Kota Jayapura	25	5.000.000.000
448	Kab. Sarmi	2	400.000.000
449	Kab. Keerom	-	-
450	Kab. Waropen	-	-
451	Kab. Supiori	-	-
452	Kab. Mamberamo Raya	-	-
453	Provinsi Maluku Utara	-	-
454	Kab. Halmahera Tengah	-	-
455	Kota Ternate	78	15.600.000.000
456	Kab. Halmahera Barat	-	-
457	Kab. Halmahera Timur	-	-
458	Kab. Halmahera Selatan	-	-
459	Kab. Halmahera Utara	-	-
460	Kab. Kepulauan Sula	-	-
461	Kota Tidore Kepulauan	40	8.000.000.000
462	Kab. Pulau Morotai	-	-
463	Kab. Pulau Taliabu	-	-
464	Provinsi Banten	-	-
465	Kab. Lebak	5	1.000.000.000

7

No.	Daerah	Jumlah Kelurahan	Dukungan Pendanaan Kelurahan Dalam DAU 2023 (dalam rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
466	Kab. Pandeglang	13	2.600.000.000
467	Kab. Serang	-	-
468	Kab. Tangerang	28	5.600.000.000
469	Kota Cilegon	43	8.600.000.000
470	Kota Tangerang	104	20.800.000.000
471	Kota Serang	67	13.400.000.000
472	Kota Tangerang Selatan	54	10.800.000.000
473	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	-
474	Kab. Bangka	19	3.800.000.000
475	Kab. Belitung	7	1.400.000.000
476	Kota Pangkal Pinang	42	8.400.000.000
477	Kab. Bangka Selatan	3	600.000.000
478	Kab. Bangka Tengah	7	1.400.000.000
479	Kab. Bangka Barat	6	1.200.000.000
480	Kab. Belitung Timur	-	-
481	Provinsi Gorontalo	-	-
482	Kab. Boalemo	-	-
483	Kab. Gorontalo	14	2.800.000.000
484	Kota Gorontalo	50	10.000.000.000
485	Kab. Pohuwato	3	600.000.000
486	Kab. Bone Bolango	5	1.000.000.000
487	Kab. Gorontalo Utara	-	-
488	Provinsi Kepulauan Riau	-	-
489	Kab. Natuna	7	1.400.000.000
490	Kab. Kepulauan Anambas	2	400.000.000
491	Kab. Karimun	29	5.800.000.000
492	Kota Batam	64	12.800.000.000
493	Kota Tanjung Pinang	18	3.600.000.000
494	Kab. Lingga	7	1.400.000.000
495	Kab. Bintan	15	3.000.000.000
496	Provinsi Papua Barat	-	-
497	Kab. Fak Fak	7	1.400.000.000
498	Kab. Manokwari	9	1.800.000.000
499	Kab. Sorong	26	5.200.000.000
500	Kota Sorong	41	8.200.000.000
501	Kab. Raja Ampat	4	800.000.000
502	Kab. Sorong Selatan	2	400.000.000
503	Kab. Teluk Bintuni	2	400.000.000
504	Kab. Teluk Wondama	1	200.000.000
505	Kab. Kaimana	2	400.000.000
506	Kab. Maybrat	1	200.000.000
507	Kab. Tambora	-	-
508	Kab. Manokwari Selatan	-	-
509	Kab. Pegunungan Arfak	-	-
510	Provinsi Sulawesi Barat	-	-
511	Kab. Majene	20	4.000.000.000
512	Kab. Mamuju	13	2.600.000.000
513	Kab. Polewali Mandar	23	4.600.000.000
514	Kab. Mamasa	13	2.600.000.000
515	Kab. Pasangkayu	4	800.000.000
516	Kab. Mamuju Tengah	-	-
517	Provinsi Kalimantan Utara	-	-

7

No.	Daerah	Jumlah Kelurahan	Dukungan Pendanaan Kelurahan Dalam DAU 2023 (dalam rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
518	Kab. Buhungan	7	1.400.000.000
519	Kab. Malinau	-	-
520	Kab. Nunukan	8	1.600.000.000
521	Kota Tarakan	20	4.000.000.000
522	Kab. Tana Tidung	-	-
523	Provinsi Papua Selatan	-	-
524	Kab. Merauke	11	2.200.000.000
525	Kab. Boven Digoel	-	-
526	Kab. Mappi	2	400.000.000
527	Kab. Asmat	-	-
528	Provinsi Papua Tengah	-	-
529	Kab. Mimika	19	3.800.000.000
530	Kab. Nabire	9	1.800.000.000
531	Kab. Paniai	5	1.000.000.000
532	Kab. Puncak Jaya	3	600.000.000
533	Kab. Dogiyai	-	-
534	Kab. Puncak	-	-
535	Kab. Intan Jaya	-	-
536	Kab. Deiyai	-	-
537	Provinsi Papua Pegunungan	-	-
538	Kab. Jayawijaya	4	800.000.000
539	Kab. Yahukimo	1	200.000.000
540	Kab. Pegunungan Bintang	-	-
541	Kab. Tolikara	4	800.000.000
542	Kab. Mamberamo Tengah	-	-
543	Kab. Yalimo	-	-
544	Kab. Lanny Jaya	1	200.000.000
545	Kab. Nduga	-	-

Keterangan:
*) Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta diperhitungkan sebesar total alokasi DAU Tahun Anggaran 2023.

7

C. KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN PRIORITAS SERTA KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN PENDUKUNG YANG DIDANAI DARI DAU BIDANG PENDIDIKAN

1. Rincian Kegiatan Prioritas Bidang Pendidikan yang Didanai dari DAU Bidang Pendidikan untuk Provinsi

NO	KODE	KEGIATAN
1.	1.1.2.101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
2.	1.1.2.102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
3.	1.1.2.103	Pengelolaan Pendidikan Khusus
4.	1.1.3.101	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
5.	1.1.3.102	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus
6.	1.1.4.101	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi
7.	1.1.5.101	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
8.	1.1.5.102	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
9.	1.1.6.101	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
10.	1.1.7.701	Pengelolaan Pendidikan Dayah
11.	1.1.8.701	Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh
12.	1.1.8.702	Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh
13.	1.1.8.703	Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh
14.	1.1.8.704	Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Aceh
15.	1.1.8.705	Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh

Keterangan:
Khusus untuk Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan, jenis kegiatan/subkegiatan prioritas dan pendukung di bidang pendidikan yang didanai dari DAU Bidang Pendidikan untuk Provinsi/Kabupaten/Kota disesuaikan dengan kewenangan Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

3

2. Rincian Subkegiatan Prioritas Bidang Pendidikan yang Didanai dari DAU Bidang Pendidikan untuk Provinsi

Indikator	Kode Sub Kegiatan			Nomenklatur Sub Kegiatan	
	SMA	SMK	SLB	Lainnya	
Angka Partisipasi Sekolah (APS)	01.02.1.01.60	01.02.1.02.53	01.02.1.03.60		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
	01.02.1.01.02	01.02.1.02.02	01.02.1.03.02		Penambahan Ruang Kelas Sekolah
	01.02.1.01.19	01.02.1.02.15	01.02.1.03.18		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
	01.02.1.01.40	01.02.1.02.32	01.02.1.03.30		Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah
	01.02.1.01.01	01.02.1.02.01	01.02.1.03.01		Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
	01.02.1.01.39	01.02.1.02.31	01.02.1.03.38		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
	01.02.1.01.45	01.02.1.02.37	01.02.1.03.44		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah (Menengah Atas/Menengah Kejuruan/pendidikan Khusus)
	1.01.02.1.01.13	1.01.02.1.02.09	1.01.02.1.03.07		Pembangunan Asrama Sekolah
	1.01.02.1.01.30	1.01.02.1.02.22	1.01.02.1.03.23		Rehabilitasi Asrama Sekolah
	1.01.02.1.01.14	1.01.02.1.02.10	1.01.02.1.03.08		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
	1.01.02.1.01.31	1.01.02.1.02.23	1.01.02.1.03.24		Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
	1.01.02.1.01.42	1.01.02.1.02.34	1.01.02.1.03.41		Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah
	1.01.02.1.01.43	1.01.02.1.02.35	1.01.02.1.03.42		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
	1.01.02.1.01.33	1.01.02.1.02.25	1.01.02.1.03.26		Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah
		1.01.02.1.02.18	1.01.02.1.03.28		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
	1.01.02.1.01.21				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi
	1.01.02.1.01.29	1.01.02.1.02.21	1.01.02.1.03.22		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
	1.01.02.1.01.27	1.01.02.1.02.19	1.01.02.1.03.20		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
			1.01.02.1.03.13		Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas
			1.01.02.1.03.14		Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)
			1.01.02.1.03.15		Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)
			1.01.02.1.03.16		Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)
			1.01.02.1.03.17		Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)
			1.01.02.1.03.29		Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
			1.01.02.1.03.30		Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas
			1.01.02.1.03.31		Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)

Indikator	Kode Sub Kegiatan				Nomenklatur Sub Kegiatan
	SMA	SMK	SLB	Lainnya	
Literasi dan Numerasi			1.01.02.1.03.32		Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)
			1.01.02.1.03.33		Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)
			1.01.02.1.03.34		Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)
	01.04.1.01.01	01.04.1.01.01	01.04.1.01.01		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
	01.04.1.01.02	01.04.1.01.02	01.04.1.01.02		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
	01.02.1.01.50	01.02.1.02.42	01.02.1.03.49		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Pendidikan Khusus
	01.02.1.01.51	01.02.1.02.43	01.02.1.03.50		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah (Atas/Kejuruan)
	01.02.1.01.61	01.02.1.02.54	01.02.1.03.60		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
	01.02.1.01.62	01.02.1.02.55	01.02.1.03.61		Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
	01.02.1.01.57	01.02.1.02.50	01.02.1.03.56		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
	01.02.1.01.39	01.02.1.02.31	01.02.1.03.38		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
	01.02.1.01.41	01.02.1.02.38	01.02.1.03.45		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
	1.01.02.1.01.18	1.01.02.1.02.14			Pembangunan Ruang/Sudut Baca
	1.01.02.1.01.35	1.01.02.1.02.27			Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca
	1.01.02.1.01.58	1.01.02.1.02.51	1.01.02.1.03.57		Pengembangan konten digital untuk pendidikan
	1.01.02.1.01.59	1.01.02.1.02.52	1.01.02.1.03.58		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
	1.01.02.1.01.11	1.01.02.1.02.07	1.01.02.1.03.05		Pembangunan Perpustakaan Sekolah
	1.01.02.1.01.28	1.01.02.1.02.20	1.01.02.1.03.21		Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah
				1.01.03.1.01.05	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Menengah
				1.01.06.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Provinsi
				1.01.06.1.01.02	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi
				1.01.06.1.01.05	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi

7

Indikator	Kode Sub Kegiatan				Nomenklatur Sub Kegiatan
	SMA	SMK	SLB	Lainnya	
				1.01.06.1.01.06	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi
				1.01.06.1.01.07	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi
	1.01.02.1.01.08				Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa
				1.01.03.1.01.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah
				1.01.03.1.02.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus
	1.01.02.1.01.51	1.01.02.1.02.43	1.01.02.1.03.50		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan
	1.01.02.1.01.50	1.01.02.1.02.42	1.01.02.1.03.49		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan
				1.01.03.1.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
				1.01.03.1.02.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus
	1.01.02.1.01.48	1.01.02.1.02.40	1.01.02.1.03.47		Penyusunan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan
				1.01.03.1.02.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus
				1.01.03.1.01.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah
				1.01.03.1.02.06	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus
				1.01.03.1.01.06	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah
Tingkat Penyerapan Lulus SMK				1.01.03.1.02.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus
				1.01.03.1.01.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah
	-	01/02/1.02/40	-		Penyusunan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan
	-	01/02/1.02/45	-		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan
	-	01/02/1.02/44	-		Pembangunan Bengkel/Unit Produksi
	-	01/02/1.02/37	-		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan
		1.01.02.1.02.41			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
		01/02/1.02/04			Pembangunan Ruang Praktik Siswa
		01/02/1.02/17			Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa
		01/02/1.02/33			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	01/02/1.02/45	-		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan

3. Rincian Subkegiatan Pendukung yang Didanai dari DAU Bidang Pendidikan untuk Provinsi

NO	KODE	SUBKEGIATAN
1	1.02.02.1.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
2	1.03.08.1.01.05	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Provinsi
3	1.05.02.7.04.11	Koordinasi dengan Organisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam
4	1.05.03.1.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
5	1.06.04.1.01.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
6	1.06.04.1.01.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
7	1.06.04.1.02.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
8	1.06.04.1.02.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
9	1.06.04.1.03.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
10	1.06.04.1.04.06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
11	1.06.04.1.04.07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
12	1.06.04.1.05.06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
13	1.06.04.1.05.07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
14	2.07.03.1.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
15	2.07.03.1.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja
16	2.11.08.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan
17	2.11.08.1.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
18	2.12.03.1.03.02	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil
19	2.13.05.1.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
20	2.13.05.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
21	2.13.06.3.01.01	Sosialisasi Mekanisme dan Tahapan Pembentukan Kampung Adat di 5 Wilayah Adat

NO	KODE	SUBKEGIATAN
22	2.13.07.4.01.01	Pembangunan Sanggar PKK di Kampung
23	2.13.07.4.01.02	Pelatihan dan bantuan Mesin Jahit bagi Masyarakat dan Ibu PKK di kampung
24	2.13.07.4.04.01	Pelatihan Manajemen Pemasaran bagi Kelompok Usaha (Mama-Mama dan Pemuda)
25	2.13.07.4.04.03	Pemberian Bantuan Stimulasi Usaha Kuliner bagi Orang Asli Papua (OAP)
26	2.13.07.4.04.05	Penyedia Bantuan Seni Budaya Orang Asli Papua
27	2.13.07.4.04.08	Pembangunan dan Bantuan Perlengkapan Sanggar TTG bagi Masyarakat di Kampung
28	2.13.07.4.06.02	Pelatihan dan Pendampingan Pengelolaan Kampung Wisata
29	2.13.07.4.06.03	Pelatihan dan Pemberian Simulasi bagi Kelompok Masyarakat Pesisir Papua di kampung
30	2.14.02.1.01.04	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal
31	2.14.02.1.01.05	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk SLTA-MA sesuai Kearifan Lokal
32	2.14.02.1.01.06	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk Jalur Formal Melalui Kediklatan, Kepramukaan dan Jalur Nonformal Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat/Umum Sesuai Kearifan Lokal
33	2.14.02.1.01.08	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK
34	2.19.02.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi
35	2.19.02.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi
36	2.19.02.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
37	2.19.02.1.01.04	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
38	2.19.02.1.01.05	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi
39	2.19.02.1.01.06	Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi
40	2.19.02.1.01.07	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan,

7

NO	KODE	SUBKEGIATAN
		Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan
41	2.19.02.1.01.08	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi
42	2.19.02.1.01.09	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
43	2.19.02.1.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha
44	2.19.02.1.02.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi
45	2.19.03.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
46	2.19.03.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus
47	2.19.03.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi
48	2.19.03.1.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi
49	2.19.03.1.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi
50	2.19.03.1.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event
51	2.19.03.1.03.01	Seleksi Atlet Daerah
52	2.19.03.1.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
53	2.19.03.1.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi
54	2.19.03.1.03.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi
55	2.19.03.1.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga
56	2.19.03.1.04.01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan
57	2.19.03.1.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan
58	2.19.03.1.04.03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait
59	2.19.03.1.04.04	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi
60	2.19.04.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik

7

NO	KODE	SUBKEGIATAN
61	2.19.04.1.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi
62	2.19.04.1.01.03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi
63	2.19.04.1.01.04	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi
64	2.19.04.1.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi
65	2.19.04.1.01.06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi
66	2.19.04.1.01.07	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi
67	2.19.04.1.01.08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan
68	2.22.02.1.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
69	2.22.02.1.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
70	2.22.02.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya
71	2.22.02.1.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
72	2.22.02.1.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
73	2.22.02.1.02.03	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
74	2.22.02.1.03.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
75	2.22.02.1.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat
76	2.22.02.1.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat
77	2.22.03.1.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
78	2.22.03.1.01.02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan
79	2.22.03.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
80	2.22.04.1.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi
81	2.22.04.1.01.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah
82	2.22.04.1.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah
83	2.22.04.1.01.04	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal
84	2.22.05.1.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
85	2.22.05.1.01.02	Penetapan Cagar Budaya
86	2.22.05.1.02.01	Pelindungan Cagar Budaya
87	2.22.05.1.02.02	Pengembangan Cagar Budaya

7

NO	KODE	SUBKEGIATAN
88	2.22.05.1.02.03	Pemanfaatan Cagar Budaya
89	2.22.05.1.02.04	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya
90	2.22.05.1.03.01	Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi
91	2.22.05.1.03.02	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi
92	2.22.06.1.01.01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu
93	2.22.06.1.01.02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman
94	2.22.06.1.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum
95	2.22.06.1.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
96	2.22.06.1.01.05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum
97	2.22.07.7.01.01	Pembinaan Adat Scumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional
98	2.22.07.7.01.02	Pemasyarakatan Adat Do Da Idi
99	2.22.07.7.01.03	Sosialisasi Adat Istiadat
100	2.22.07.7.01.04	Pembinaan Keluarga Meuadab dan Adat Perkawinan
101	2.22.07.7.01.05	Pengadaan Buku-Buku Tentang Adat Aceh
102	2.22.07.7.01.06	Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang
103	2.22.07.7.02.01	Pelatihan Peradilan Adat
104	2.22.07.7.02.02	Rapat Koordinasi/Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas)
105	2.22.07.7.02.03	Pembinaan Mediasi Adat
106	2.22.07.7.02.04	Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat
107	2.22.07.7.03.01	Pembinaan Kapasitas MAA Kabupaten/Kota dan Perwakilan
108	2.22.07.7.03.02	Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat
109	2.22.07.7.03.03	Rapat Kerja MAA
110	2.22.07.7.03.04	Penerbitan Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat
111	2.22.07.7.03.05	Pembinaan Pemuda Pelopor Adat
112	2.22.07.7.03.06	Pendataan dan Dokumentasi Sengketa Adat
113	2.22.07.7.03.07	Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan Adat
114	2.22.08.5.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan
115	2.22.08.5.01.02	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra
116	2.22.08.5.01.03	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman
117	2.22.08.5.02.01	Pengelolaan Koleksi Perpustakaan dan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten
118	2.22.08.5.02.02	Pengelolaan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten
119	2.22.08.5.02.03	Pengelolaan Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya
120	2.22.08.5.03.01	Pengelolaan Museum Sonobudoyo
121	2.22.08.5.03.02	Pengembangan Museum Sonobudoyo

9

NO	KODE	SUBKEGIATAN
122	2.22.08.5.04.01	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya
123	2.22.08.5.04.02	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya
124	2.22.08.5.04.03	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia
125	2.22.08.5.05.01	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Yogyakarta
126	2.22.08.5.06.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya
127	2.22.08.5.06.02	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital
128	2.22.08.5.06.03	Pengadaan Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan
129	2.22.08.5.06.04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya
130	2.22.08.5.07.01	Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan
131	2.22.08.5.07.02	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan
132	2.22.08.5.07.03	Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya
133	2.22.08.5.08.01	Pengembangan Lumbung Mataraman
134	2.22.08.5.08.02	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya
135	2.22.08.5.08.03	Pengembangan Industri Kreatif
136	2.22.08.5.08.04	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional
137	2.22.08.5.08.05	Pengembangan Budaya Bahari
138	2.22.08.5.08.06	Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram
139	2.22.08.5.08.07	Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional
140	2.22.08.5.09.01	Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya
141	2.22.08.5.09.02	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni
142	2.22.08.5.09.03	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya
143	2.22.08.5.09.04	Penghargaan Seniman dan Budayawan
144	2.22.08.5.09.05	Festival Kebudayaan Yogyakarta
145	2.22.08.5.09.06	Gelar Budaya Yogyakarta
146	2.22.08.5.09.07	Publikasi Seni dan Budaya Daerah
147	2.22.08.5.09.08	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi
148	2.22.08.5.09.09	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat
149	2.22.08.5.09.10	Selendang Sutera
150	2.22.08.5.09.11	Penyelenggaraan Even Penggiat Seni
151	2.22.08.5.09.12	Gelar Seni Budaya Daerah
152	2.22.08.5.09.13	Pembinaan dan Pelatihan Seni dan Budaya Tradisional Yogyakarta
153	2.22.08.5.09.14	Penguatan Lembaga Pelestari Budaya
154	2.22.08.5.09.15	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi
155	2.22.08.5.09.16	Pembinaan Jagawarga
156	2.22.08.5.09.17	Pengembangan Kewirausahaan Desa
157	2.22.08.5.09.18	Peningkatan Lembaga Wisata Budaya

7

NO	KODE	SUBKEGIATAN
158	2.22.08.5.09.19	Pengembangan Ekonomi Perempuan
159	2.22.08.5.09.20	Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa
160	2.22.08.5.09.21	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya
161	2.22.08.5.09.22	Revitalisasi Budaya Gotong Royong Untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa
162	2.22.08.5.09.23	Penumbuhan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, dan Kesetiakawanan Sosial
163	2.22.08.5.10.01	Pembinaan Muatan Lokal
164	2.22.08.5.10.02	Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan
165	2.22.08.5.10.03	Kependidikan Kepramukaan
166	2.22.08.5.10.04	Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta
167	2.22.09.8.01.01	Pembinaan Pemerintahan Desa Adat
168	2.22.09.8.01.02	Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat
169	2.22.09.8.01.03	Pembinaan Tata Kelola Keuangan Desa Adat
170	2.22.09.8.02.01	Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat
171	2.22.09.8.02.02	Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat
172	2.22.09.8.02.03	Fasilitasi Kerja Sama Antar Lembaga
173	2.22.09.8.03.01	Koordinasi dan Penyelenggaraan Parahyangan
174	2.22.09.8.03.02	Koordinasi dan Penyelenggaraan Pawongan
175	2.22.09.8.03.03	Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan
176	2.22.09.8.04.01	Pembinaan Prajurit Desa Adat
177	2.22.09.8.04.02	Pembinaan Pendidikan Pasraman
178	2.22.09.8.04.03	Pembinaan SDM Lembaga Adat
179	2.23.02.1.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
180	2.23.02.1.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
181	2.23.02.1.01.03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi
182	2.23.02.1.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
183	2.23.02.1.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi
184	2.23.02.1.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi
185	2.23.02.1.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
186	2.23.02.1.01.08	Pengembangan Perpustakaan Deposit
187	2.23.02.1.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
188	2.23.02.1.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi

7

NO	KODE	SUBKEGIATAN
189	2.23.02.1.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
190	2.23.02.1.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
191	2.23.02.1.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
192	2.23.02.1.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
193	2.23.02.1.02.05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi
194	2.23.03.1.01.01	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
195	2.23.03.1.01.02	Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
196	2.23.03.1.02.01	Penerbitan Katalog Induk Daerah
197	2.23.03.1.02.02	Penerbitan Bibliografi Daerah
198	2.23.03.1.03.01	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno
199	2.23.03.1.03.02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan
200	2.23.03.1.04.01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara
201	2.23.03.1.04.02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara
202	3.25.02.1.03.01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
203	3.25.02.1.03.02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
204	3.25.02.1.03.03	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
205	3.25.02.1.03.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
206	3.26.02.1.02.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
207	3.26.02.1.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
208	3.26.04.1.02.02	Pengembangan Pendidikan
209	3.26.05.1.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
210	3.26.05.1.01.02	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

7

NO	KODE	SUBKEGIATAN
211	3.26.05.1.01.03	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan
212	3.26.05.1.01.04	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
213	3.26.05.1.01.05	Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA)
214	3.26.05.1.01.06	Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC)
215	3.26.05.1.01.09	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
216	3.26.05.1.01.10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
217	3.26.05.1.02.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
218	3.27.02.1.04.03	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
219	3.27.07.1.02.02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
220	3.27.07.1.03.04	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani
221	3.28.04.1.01.08	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi
222	3.28.04.1.03.05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
223	3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan
224	3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
225	3.28.06.1.01.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS
226	3.32.03.1.01.05	Penyuluhan Transmigrasi
227	3.32.03.1.01.06	Pelatihan Transmigrasi
228	3.32.04.1.01.01	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman
229	3.32.04.1.01.02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman
230	4.01.04.1.01.01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
231	4.01.04.1.01.02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
232	4.01.04.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
233	4.01.09.3.03.01	Pembangunan Gedung Universitas/ Sekolah Tinggi/Akademi
234	4.01.09.3.03.02	Pembangunan Laboratorium Pendidikan Tinggi
235	4.01.09.3.03.03	Pembangunan Ruang Belajar Pendidikan Tinggi

7

NO	KODE	SUBKEGIATAN
236	4.01.09.3.03.04	Pembangunan Gedung Serba Guna
237	4.01.09.3.03.05	Pembangunan Perpustakaan
238	4.01.09.3.03.06	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
239	4.01.09.3.03.07	Pemeliharaan Gedung Universitas/ Sekolah Tinggi/Akademi
240	4.01.09.3.03.08	Pemeliharaan Ruang Belajar Pendidikan Tinggi
241	4.01.09.3.03.09	Pemeliharaan Gedung Serba Guna
242	4.01.09.3.03.10	Pemeliharaan Perpustakaan
243	4.01.09.3.03.11	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga
244	4.01.09.3.03.12	Rehabilitasi Gedung Universitas/ Sekolah Tinggi/Akademi
245	4.01.09.3.03.13	Rehabilitasi Laboratorium Pendidikan Tinggi
246	4.01.09.3.03.14	Rehabilitasi Ruang Belajar Pendidikan Tinggi
247	4.01.09.3.03.15	Rehabilitasi Gedung Serba Guna
248	4.01.09.3.03.16	Rehabilitasi Perpustakaan
249	4.01.09.3.03.17	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga
250	4.01.09.3.03.18	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi
251	4.01.09.3.04.01	Penyediaan Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma dan Strata
252	4.01.09.3.04.02	Penyediaan Beasiswa Status Dosen Jenjang Strata Dua dan Tiga
253	4.01.09.3.04.03	Penyediaan Bantuan Akhir Studi
254	4.01.09.3.04.04	Penyediaan Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma dan Strata
255	4.01.09.3.04.05	Penyediaan Beasiswa Studi Khusus dan Sesuai Kebutuhan Daerah
256	4.01.09.3.04.06	Penyediaan Biaya Afiriasi Pendidikan Tinggi (ADIK)
257	4.01.09.3.04.07	Penyediaan Biaya Afiriasi Pendidikan Sebutan Lainnya
258	4.01.12.4.02.05	Pembangunan Perpustakaan
259	4.01.12.4.02.10	Pemeliharaan Perpustakaan
260	4.01.12.4.02.16	Rehabilitasi Perpustakaan
261	5.05.02.1.01.01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
262	5.05.02.1.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
263	5.05.02.1.01.03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
264	5.05.02.1.01.04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi
265	5.05.02.1.01.05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi

7

NO	KODE	SUBKEGIATAN
266	5.05.02.1.01.06	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat
267	5.05.02.1.01.07	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa
268	5.05.02.1.01.08	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa
269	5.05.02.1.01.09	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa
270	5.05.02.1.01.10	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa
271	5.05.02.1.01.11	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa
272	5.05.02.1.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
273	5.05.02.1.01.13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Pencapaian Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan
274	5.05.02.1.01.14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan
275	5.05.02.1.01.15	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang
276	5.05.02.1.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial
277	5.05.02.1.02.02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
278	5.05.02.1.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
279	5.05.02.1.02.04	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga
280	5.05.02.1.02.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
281	5.05.02.1.02.06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
282	5.05.02.1.02.07	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
283	5.05.02.1.02.08	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
284	5.05.02.1.02.09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja
285	5.05.02.1.02.10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
286	5.05.02.1.02.11	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi
287	5.05.02.1.03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
288	5.05.02.1.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
289	5.05.02.1.03.03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah

7

NO	KODE	SUBKEGIATAN
290	5.05.02.1.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
291	5.05.02.1.03.05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
292	5.05.02.1.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
293	5.05.02.1.03.08	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
294	5.05.02.1.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
295	5.05.02.1.03.10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
296	5.05.02.1.03.11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
297	5.05.02.1.03.12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan
298	5.05.02.1.03.13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika
299	5.05.02.1.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
300	5.05.02.1.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
301	7.01.02.6.02.07	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan
302	7.01.02.6.02.09	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan Tingkat Kelurahan
303	7.01.02.6.04.03	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan
304	7.01.02.6.05.01	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan
305	7.02.02.6.03.34	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pendidikan, Mental, Spiritual, Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi
306	7.03.02.6.03.16	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pendidikan, Olahraga dan Pemuda serta Perpustakaan dan Arsip
307	7.03.02.6.03.18	Pelatihan Keterampilan dan Ketenagakerjaan
308	7.03.02.6.03.19	Penyediaan Akomodasi Pengiriman Peserta Pelatihan ke Pusat Pelatihan Kerja Daerah
309	9.01.02.7.01.01	Pelatihan Mawaris
310	9.01.02.7.01.02	TOT Modul Wawasan Keislaman bagi Guru Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Atas
311	9.01.02.7.01.03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tokoh Masyarakat dalam Pelaksanaan Syariat Islam
312	9.01.02.7.01.04	Peningkatan Kapasitas Tenaga Hisab dan Ru'yat
313	9.01.02.7.01.05	Seminar Problematika Syariat Islam
314	9.01.02.7.01.06	Pembinaan Mental Spritual Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas Sederajat

7

NO	KODE	SUBKEGIATAN
315	9.01.02.7.02.01	Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Quran
316	9.01.02.7.02.02	Bimbingan Teknis Tenaga Pelatihan/Juri Tilawatil Quran
317	9.01.02.7.02.03	Pembinaan Imam Hafid pada Masjid
318	9.01.02.7.02.04	Pelaksanaan MTQ
319	9.01.02.7.02.05	Pelatihan/Training Center Peserta MTQ/STQ Tingkat Nasional
320	9.01.02.7.02.06	Pemberangkatan Kafilah Aceh Mengikuti MTQ/STQ Tingkat Nasional dan Internasional
321	9.01.02.7.03.01	Working Group Penyelesaian Permasalahan Syariat Islam
322	9.01.02.7.04.01	Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakkan Syariat Islam
323	9.01.02.7.04.02	Pembinaan Dai Perbatasan dan Daerah Terpencil
324	9.01.02.7.04.03	Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Dai dan Koordinator Lapangan
325	9.01.02.7.04.04	Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan
326	9.01.02.7.04.05	Pelatihan Takmir Mesjid Se Aceh
327	9.01.02.7.04.06	Pelaksanaan Cerdas Cermat Syariat Islam
328	9.01.02.7.04.07	Pembinaan Gampong Percontohan Syariat
329	9.01.02.7.04.10	Penyelenggaraan Pengajian di Gampong
330	9.01.02.7.05.01	Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman
331	9.01.02.7.05.03	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Imeum Meunasah dalam Pelaksanaan Syariat Islam
332	9.01.02.7.05.04	Pembinaan Keluarga Islami
333	9.01.02.7.05.05	Pembinaan Pelaku Ekonomi Mikro/Kecil Berbasis Syariah
334	9.01.02.7.06.01	Penyuluhan Regulasi Syariat Islam
335	9.01.02.7.07.01	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan dan Dakwah pada Masjid Raya Baiturrahman
336	9.01.02.7.07.02	Bimbingan Teknis Petugasan IT Masjid Raya Baiturrahman
337	9.01.02.7.07.04	Pelatihan Tutor Pendidikan Al-quran di Masjid Raya Baiturrahman
338	9.01.02.7.07.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung dan Bangunan Masjid Raya Baiturrahman Aceh
339	9.01.03.7.01.01	Pembinaan Badan Otonom Majelis Permusyawaratan Ulama
340	9.01.03.7.01.03	Pendidikan Kader Ulama
341	9.01.03.7.01.07	Penterjemahan Kitab Berbahasa Arab dan Pengadaannya
342	9.01.03.7.01.10	Nadwah/Mubahasah Ilmiah
343	9.01.03.7.01.11	Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam
344	9.01.03.7.01.13	Kajian Pedoman Keagamaan
345	9.01.03.7.02.01	Lokakarya Ulama Umara Bidang Muamallah
346	9.01.04.7.02.01	Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran ZISWAF
347	9.01.04.7.02.02	Pembinaan dan Koordinasi Baitul Mal Kabupaten/Kota

7

NO	KODE	SUBKEGIATAN
348	9.01.06.7.01.02	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Imeum Mukim
349	9.01.06.7.01.06	Peningkatan Kapasitas Perangkat Wali Nanggroe
350	9.01.06.7.03.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kehidupan Lembaga-Lembaga Adat
351	9.01.06.7.03.02	Pembinaan Khazanah Aceh Dalam Negeri dan Luar Negeri

4. Rincian Kegiatan Prioritas Bidang Pendidikan yang Didanai dari DAU Bidang Pendidikan untuk Kabupaten/Kota

NO.	KODE	KEGIATAN
1.	1.1.2.201	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
2.	1.1.2.202	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
3.	1.1.2.203	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
4.	1.1.2.204	Pengelolaan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan
5.	1.1.3.201	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
6.	1.1.3.202	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal
7.	1.1.4.201	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan
8.	1.1.5.201	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
9.	1.1.5.202	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan NonFormal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
10.	1.1.6.201	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
11.	1.1.7.701	Pengelolaan Pendidikan Dayah
12.	1.1.8.701	Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh
13.	1.1.8.702	Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh
14.	1.1.8.703	Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh
15.	1.1.8.704	Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Aceh
16.	1.1.8.705	Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh

7

5. Rincian Subkegiatan Prioritas yang Didanai dari DAU Bidang Pendidikan untuk Kabupaten/Kota

INDIKATOR	KODE SUB KEGIATAN				NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	
	PAUD	SD	SMP	KESETARAAN	LAINNYA	
Angka Partisipasi Sekolah (APS)	01.02.2.03.25	01.02.2.01.38	01.02.2.02.51			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
	01.02.2.03.01			1.01.02.2.04.01		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru
	01.02.2.03.02	01.02.2.01.02	01.02.2.02.02			Penambahan Ruang Kelas Baru
	01.02.2.03.15					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
	01.02.2.03.10	01.02.2.01.17	01.02.2.02.28			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan
	01.02.2.03.11	01.02.2.01.21	01.02.2.02.32			Pengadaan Perlengkapan Siswa
		01.02.2.01.08	01.02.2.02.14			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik
		01.02.2.01.01	01.02.2.02.01			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
	1.01.02.2.03.02	01.02.2.01.06	01.02.2.02.12	1.01.02.2.04.02		Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
	1.01.02.2.03.04	01.02.2.01.12	01.02.2.02.24	1.01.02.2.04.04		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
	1.01.02.2.03.03					Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas
	1.01.02.2.03.03					Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
		1.01.02.2.01.18	01.02.2.02.29	1.01.02.2.04.05		Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah
		1.01.02.2.01.19	01.02.2.02.30	1.01.02.2.04.06		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
			01.02.2.02.13			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah
	1.01.02.2.03.03					Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
				1.01.02.2.04.03		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan
Literasi dan Numerasi			01.02.2.02.23			Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah
			01.02.2.02.18			Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
		01.02.2.01.32				Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar
			01.02.2.02.45			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah
			01.02.2.02.19			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
			01.02.2.02.44			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU
		01.02.2.01.10	01.02.2.02.16		01.04.2.01.01	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						

INDIKATOR	KODE SUB KEGIATAN				NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	
	PAUD	SD	SMP	KESETARAAN	LAINNYA	
					01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
	1.01.02.2.03.1 ₅	1.01.02.2.01.26	1.01.02.2.02.39	1.01.02.2.04.14		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
	1.01.02.2.03.1 ₆	1.01.02.2.01.27	1.01.02.2.02.40	1.01.02.2.04.15		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
		1.01.02.2.01.40	1.01.02.2.02.53			Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
		1.01.02.2.01.39	1.01.02.2.02.52			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
		1.01.02.2.01.35	1.01.02.2.02.48			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
		1.01.02.2.01.17	1.01.02.2.02.28			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
		01.02.2.01.22	01.02.2.02.35			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
		1.01.02.2.01.16	1.01.02.2.02.27			Pengadaan Perlengkapan Sekolah
		1.01.02.2.01.36	1.01.02.2.02.49			Pengembangan konten digital untuk pendidikan
		1.01.02.2.01.37	1.01.02.2.02.50			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
		1.01.02.2.01.05	1.01.02.2.02.05			Pembangunan Perpustakaan Sekolah
		1.01.02.2.01.11	1.01.02.2.02.17			Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah
					1.01.03.2.01.05	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar
					1.01.06.2.01.01	Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten / Kota
					1.01.06.2.01.02	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota
					1.01.06.2.01.05	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota
					1.01.06.2.01.06	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota
					1.01.06.2.01.07	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota
					1.01.03.2.01.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar
					1.01.03.2.02.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
			1.01.02.2.02.15			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah
		1.01.02.2.01.09				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
	1.01.02.2.03.1 ₅	1.01.02.2.01.26	1.01.02.2.02.39	1.01.02.2.04.14		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan
		1.01.03.2.01.04				Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar

3

INDIKATOR	KODE SUB KEGIATAN				NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	
	PAUD	SD	SMP	KESETARAAN	LAINNYA	
	1.01.02.2.03.1 ₄	1.01.02.2.01.24	1.01.02.2.02.37	1.01.02.2.04.13		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD
					1.01.03.2.02.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
					1.01.03.2.01.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar
					1.01.03.2.02.05	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
					1.01.03.2.01.06	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar
					1.01.03.2.02.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
					1.01.03.2.01.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar
	01.02.2.03.26					Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
	01.02.2.03.27					Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
	01.02.2.03.17					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	01.02.2.03.03					Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
	01.02.2.03.04					Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
	01.02.2.03.05					Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
	01.02.2.03.06					Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
	1.01.02.2.03.0					Pengadaan Mebel PAUD
	1.01.02.2.03.0					Pengadaan Perlengkapan PAUD
	1.01.02.2.03.1					Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD
	1.01.02.2.03.1					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
	1.01.02.2.03.2					Pemeliharaan Mebel Sekolah
	1.01.05.2.02.0					Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
Pertumbuhan Proporsi Guru	1.01.05.2.02.0					Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
	01.02.2.03.16					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD

7

2

INDIKATOR	KODE SUB KEGIATAN				NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
	PAUD	SD	SMP	KESETARAAN	LAINNYA
PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	1.01.02.2.03.1 5				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
Rasio pengawas dan penilik PAUD	01.04.2.01.01				Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
	01.04.2.01.02				Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

6. Rincian Subkegiatan Pendukung yang Didanai dari DAU Bidang Pendidikan untuk Kabupaten/Kota

NO	KODE	SUBKEGIATAN
1	1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
2	1.03.04.2.01.08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
3	1.03.05.2.01.09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik
4	1.03.08.2.01.06	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota
5	1.03.08.2.01.07	Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota
6	1.05.02.7.04.11	Koordinasi dengan Organisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam
7	1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
8	1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
9	1.06.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT
10	1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
11	1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
12	1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
13	1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
14	1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
15	1.06.04.2.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
16	2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
17	2.07.03.2.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
18	2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
19	2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
20	2.08.02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

7

NO	KODE	SUBKEGIATAN
21	2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
22	2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
23	2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
24	2.08.04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
25	2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
26	2.08.04.2.02.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
27	2.08.04.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
28	2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
29	2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
30	2.10.14.7.01.01	Pembinaan Kerja Sama Pendidikan Pertanian
31	2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
32	2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
33	2.11.08.2.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
34	2.12.03.2.03.04	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil
35	2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
36	2.14.02.2.01.05	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal
37	2.14.02.2.01.06	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal
38	2.14.02.2.01.07	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota
39	2.14.02.2.01.08	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota

NO	KODE	SUBKEGIATAN
40	2.14.02.2.01.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal
41	2.14.02.2.01.10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal
42	2.14.02.2.01.11	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan
43	2.19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor
44	2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula
45	2.19.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota
46	2.19.02.2.01.04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan
47	2.19.02.2.01.05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota
48	2.19.02.2.01.06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota
49	2.19.02.2.01.07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi
50	2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
51	2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
52	2.19.02.2.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha
53	2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota
54	2.19.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
55	2.19.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar

7

NO	KODE	SUBKEGIATAN
56	2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
57	2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
58	2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota
59	2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan
60	2.19.03.2.03.01	Seleksi Atlet Daerah
61	2.19.03.2.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
62	2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota
63	2.19.03.2.03.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota
64	2.19.03.2.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga
65	2.19.03.2.04.01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan
66	2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan
67	2.19.03.2.04.03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait
68	2.19.03.2.04.04	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi
69	2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi
70	2.19.03.2.05.02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi
71	2.19.03.2.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi
72	2.19.03.2.05.04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan
73	2.19.03.2.05.05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat
74	2.19.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik
75	2.19.04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah
76	2.19.04.2.01.03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah
77	2.19.04.2.01.04	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota
78	2.19.04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah
79	2.19.04.2.01.06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah
80	2.19.04.2.01.07	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah
81	2.19.04.2.01.08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan
82	2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
83	2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan

7

NO	KODE	SUBKEGIATAN
84	2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
85	2.22.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
86	2.22.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
87	2.22.02.2.03.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
88	2.22.02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat
89	2.22.02.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat
90	2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
91	2.22.03.2.01.02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan
92	2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
93	2.22.04.2.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota
94	2.22.04.2.01.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah
95	2.22.04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah
96	2.22.05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
97	2.22.05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya
98	2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya
99	2.22.05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya
100	2.22.05.2.02.03	Pemanfaatan Cagar Budaya
101	2.22.05.2.03.01	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
102	2.22.05.2.03.02	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
103	2.22.06.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu
104	2.22.06.2.01.02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman
105	2.22.06.2.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum
106	2.22.06.2.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
107	2.22.06.2.01.05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum
108	2.22.07.7.01.01	Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional
109	2.22.07.7.01.02	Pemasyarakatan Adat Do Da Idi
110	2.22.07.7.01.03	Sosialisasi Adat Istiadat
111	2.22.07.7.01.04	Pembinaan Keluarga Meudadab dan Adat Perkawinan

7

NO	KODE	SUBKEGIATAN
112	2.22.07.7.01.05	Pengadaan Buku-Buku tentang Adat Aceh
113	2.22.07.7.01.06	Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang
114	2.22.07.7.02.01	Penguatan Peradilan Adat
115	2.22.07.7.02.02	Rapat Koordinasi/Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas)
116	2.22.07.7.02.03	Pembinaan Mediasi Adat
117	2.22.07.7.02.04	Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat
118	2.22.07.7.03.01	Pembinaan Kapasitas MAA
119	2.22.07.7.03.02	Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat
120	2.22.07.7.03.03	Rapat Kerja MAA
121	2.22.07.7.03.04	Penerbitan Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat
122	2.22.07.7.03.05	Pembinaan Pemuda Pelopor Adat
123	2.22.07.7.03.06	Pendataan dan Dokumentasi Sengketa Adat
124	2.22.07.7.03.07	Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan Adat
125	2.22.08.5.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Kesenjajaran
126	2.22.08.5.01.02	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra
127	2.22.08.5.01.03	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman
128	2.22.08.5.02.01	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya
129	2.22.08.5.02.02	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya
130	2.22.08.5.02.03	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia
131	2.22.08.5.03.01	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota
132	2.22.08.5.04.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya
133	2.22.08.5.04.02	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital
134	2.22.08.5.04.03	Pengadaan Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan
135	2.22.08.5.04.04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya
136	2.22.08.5.05.01	Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan
137	2.22.08.5.05.02	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan
138	2.22.08.5.05.03	Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya
139	2.22.08.5.06.01	Pengembangan Lumbung Mataraman
140	2.22.08.5.06.02	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya
141	2.22.08.5.06.03	Pengembangan Industri Kreatif
142	2.22.08.5.06.04	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional
143	2.22.08.5.06.05	Pengembangan Budaya Bahari
144	2.22.08.5.06.06	Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram
145	2.22.08.5.06.07	Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional
146	2.22.08.5.07.01	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya
147	2.22.08.5.07.02	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni
148	2.22.08.5.07.03	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya
149	2.22.08.5.07.04	Penghargaan Seniman dan Budayawan

7

NO	KODE	SUBKEGIATAN
150	2.22.08.5.07.05	Festival Kebudayaan Yogyakarta
151	2.22.08.5.07.06	Gelar Budaya Jogja
152	2.22.08.5.07.07	Publikasi Seni dan Budaya Daerah
153	2.22.08.5.07.08	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi
154	2.22.08.5.07.09	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat
155	2.22.08.5.07.10	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni
156	2.22.08.5.07.11	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi
157	2.22.08.5.07.12	Pembinaan Jagawarga
158	2.22.08.5.07.13	Pengembangan Kewirausahaan Desa
159	2.22.08.5.07.14	Peningkatan Lembaga Wisata Budaya
160	2.22.08.5.07.15	Pengembangan Ekonomi Perempuan
161	2.22.08.5.07.16	Pengelolaan dan Pengembangan Museum Gunung Api Merapi
162	2.22.08.5.07.17	Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa
163	2.22.08.5.07.18	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya
164	2.22.08.5.08.01	Pembinaan Muatan Lokal
165	2.22.08.5.08.02	Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan
166	2.22.08.5.08.03	Kependidikan Kepramukaan
167	2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
168	2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
169	2.23.02.2.01.03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
170	2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
171	2.23.02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota
172	2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
173	2.23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
174	2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka
175	2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
176	2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
177	2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
178	2.23.02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
179	2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
180	2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial

7

NO	KODE	SUBKEGIATAN
181	2.23.02.2.02.05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
182	2.23.03.2.01.01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno
183	2.23.03.2.01.02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan
184	2.23.03.2.02.01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara
185	2.23.03.2.02.02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara
186	3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
187	3.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
188	3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
189	3.26.02.2.02.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
190	3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
191	3.26.04.2.02.02	Pengembangan Pendidikan
192	3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
193	3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
194	3.26.05.2.01.03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)
195	3.26.05.2.01.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
196	3.26.05.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
197	3.26.05.2.02.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
198	3.27.07.2.01.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
199	3.32.03.2.01.05	Penyuluhan Transmigrasi
200	3.32.03.2.01.06	Pelatihan Transmigrasi
201	3.32.04.2.01.01	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman
202	4.01.04.5.04.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan
203	4.01.04.5.04.02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan
204	5.05.02.2.01.01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
205	5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
206	5.05.02.2.01.03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

7

NO	KODE	SUBKEGIATAN
207	5.05.02.2.01.04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi
208	5.05.02.2.01.05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi
209	5.05.02.2.01.06	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat
210	5.05.02.2.01.07	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa
211	5.05.02.2.01.08	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa
212	5.05.02.2.01.09	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa
213	5.05.02.2.01.10	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa
214	5.05.02.2.01.11	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa
215	5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
216	5.05.02.2.01.13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan
217	5.05.02.2.01.14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan
218	5.05.02.2.01.15	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang
219	5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial
220	5.05.02.2.02.02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
221	5.05.02.2.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
222	5.05.02.2.02.04	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga
223	5.05.02.2.02.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
224	5.05.02.2.02.06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
225	5.05.02.2.02.07	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
226	5.05.02.2.02.08	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
227	5.05.02.2.02.09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja
228	5.05.02.2.02.10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
229	5.05.02.2.02.11	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi
230	5.05.02.2.03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

7

NO	KODE	SUBKEGIATAN
231	5.05.02.2.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
232	5.05.02.2.03.03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah
233	5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
234	5.05.02.2.03.05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
235	5.05.02.2.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
236	5.05.02.2.03.08	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
237	5.05.02.2.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
238	5.05.02.2.03.10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
239	5.05.02.2.03.11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
240	5.05.02.2.03.12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan
241	5.05.02.2.03.13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika
242	5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
243	5.05.02.2.04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
244	5.05.02.2.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
245	9.01.02.7.01.01	Pelatihan Mawaris
246	9.01.02.7.01.02	TOT Modul Wawasan Keislaman bagi Guru Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Atas
247	9.01.02.7.01.03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tokoh Masyarakat dalam Pelaksanaan Syariat Islam
248	9.01.02.7.01.04	Peningkatan Kapasitas Tenaga Hisab dan Ru'yat
249	9.01.02.7.01.05	Seminar Problematika Syariat Islam
250	9.01.02.7.01.06	Pembinaan Mental Spritual Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas Sederajat
251	9.01.02.7.02.01	Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Quran
252	9.01.02.7.02.02	Peningkatan Kualitas Tenaga Pelatihan/Juri Tilawatil Quran
253	9.01.02.7.02.03	Pembinaan Imam Hafidz pada Masjid
254	9.01.02.7.02.04	Pelaksanaan MTQ
255	9.01.02.7.02.05	Pelatihan/Training Center Peserta MTQ/STQ Tingkat Nasional
256	9.01.02.7.02.06	Pemberangkatan Kafilah Mengikuti MTQ/STQ Tingkat Nasional dan Internasional
257	9.01.02.7.03.01	Working Group Penyelesaian Permasalahan Syariat Islam
258	9.01.02.7.04.01	Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakkan Syariat Islam
259	9.01.02.7.04.02	Pembinaan Dai Perbatasan dan Daerah Terpencil
260	9.01.02.7.04.03	Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Dai dan Koordinator Lapangan
261	9.01.02.7.04.04	Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan
262	9.01.02.7.04.05	Pelatihan Takmir Mesjid

7

NO	KODE	SUBKEGIATAN
263	9.01.02.7.04.06	Pelaksanaan Cerdas Cermat Syariat Islam
264	9.01.02.7.04.07	Pembinaan Gampong Percontohan Syariat
265	9.01.02.7.04.10	Penyelenggaraan Pengajian di Gampong
266	9.01.02.7.05.01	Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman
267	9.01.02.7.05.03	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Imcun Masjid/Meunasah dalam Pelaksanaan Syariat Islam
268	9.01.02.7.05.04	Pembinaan Keluarga Islami
269	9.01.02.7.05.05	Pembinaan Pelaku Ekonomi Mikro/Kecil Berbasis Syariah
270	9.01.02.7.05.06	Pelatihan Penyelenggaraan Fardu Kifayah/Tajhiz Mayat
271	9.01.02.7.05.07	Pembinaan Badan Kemakmuran Masjid/Meunasah/ Mushalla
272	9.01.02.7.05.08	Pembinaan Qari Qariah
273	9.01.02.7.05.09	Pembinaan Hafizh Hafizhah
274	9.01.02.7.05.10	Pemberian Beasiswa bagi Qari/Hafidz
275	9.01.02.7.06.01	Penyuluhan Regulasi Syariat Islam
276	9.01.02.7.07.01	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan dan Dakwah pada Masjid Agung Daerah
277	9.01.02.7.07.02	Bimbingan Teknis Petugasan IT Masjid Agung Daerah
278	9.01.02.7.07.04	Pelatihan Tutor Pendidikan Al-quran di Masjid Agung Daerah
279	9.01.03.7.01.01	Pembinaan Badan Otonom Majelis Permusyawaratan Ulama
280	9.01.03.7.01.03	Pendidikan Kader Ulama
281	9.01.03.7.01.07	Penterjemahan Kitab Berbahasa Arab dan Pengadaannya
282	9.01.03.7.01.10	Nadwah/Mubahasah Ilmiah
283	9.01.03.7.01.11	Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam
284	9.01.03.7.01.13	Kajian Pedoman Keagamaan
285	9.01.03.7.01.14	Pendidikan Kader Ulama
286	9.01.03.7.02.01	Lokakarya Ulama Umara Bidang Muamallah
287	9.01.04.7.02.01	Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran ZISWAF

7

D. KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN PRIORITAS SERTA KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN PENDUKUNG YANG DIDANAI DARI DAU BIDANG KESEHATAN

1. Rincian Kegiatan Prioritas yang Didanai dari DAU Bidang Kesehatan untuk Provinsi

NO.	KODE	KEGIATAN
1.	1.2.2.101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
2.	1.2.2.102	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
3.	1.2.2.103	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
4.	1.2.2.104	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
5.	1.2.3.101	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi
6.	1.2.3.102	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
7.	1.2.4.101	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
8.	1.2.4.102	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
9.	1.2.5.101	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
10.	1.2.5.102	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi
11.	1.2.5.103	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi

2. Rincian Subkegiatan Prioritas yang Didanai dari DAU Bidang Kesehatan untuk Provinsi

NO.	KODE	SUBKEGIATAN
1	1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
2	1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
3	1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan

7

NO.	KODE	SUBKEGIATAN
4	1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit
5	1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
6	1.02.02.1.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
7	1.02.02.1.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana

3. Rincian Subkegiatan Pendukung yang Didanai dari DAU Bidang Kesehatan untuk Provinsi

NO	KODE	SUBKEGIATAN
1	1.03.02.3.01.67	Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi
2	1.03.02.4.01.68	Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi
3	1.03.03.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
4	1.03.03.1.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM
5	1.03.03.1.01.03	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan
6	1.03.03.1.01.04	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan
7	1.03.03.1.01.05	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan
8	1.03.03.1.01.06	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan
9	1.03.03.1.01.07	Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota
10	1.03.03.1.01.08	Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi
11	1.03.03.1.01.09	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota
12	1.03.03.1.01.10	Survei dan Investigasi untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota
13	1.03.03.1.01.11	Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota
14	1.03.03.1.01.12	Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota
15	1.03.04.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi
16	1.03.04.1.01.02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi
17	1.03.04.1.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi
18	1.03.04.1.01.04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi
19	1.03.04.1.01.05	Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi
20	1.03.04.1.01.06	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan
21	1.03.04.1.01.07	Fasilitasi Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota

7

NO	KODE	SUBKEGIATAN
22	1.03.04.1.01.08	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan
23	1.03.05.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
24	1.03.05.1.01.02	Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk
25	1.03.05.1.01.03	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat
26	1.03.05.1.01.04	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional
27	1.03.05.1.01.05	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat
28	1.03.05.1.01.06	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik
29	1.03.05.1.01.07	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik
30	1.03.05.1.01.08	Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota
31	1.03.05.1.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
32	1.05.03.1.03.01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
33	1.05.03.1.03.06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit
34	1.06.04.1.01.02	Penyediaan Sandang
35	1.06.04.1.01.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
36	1.06.04.1.01.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
37	1.06.04.1.01.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
38	1.06.04.1.01.12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar
39	1.06.04.1.02.02	Penyediaan Makanan
40	1.06.04.1.02.03	Penyediaan Sandang
41	1.06.04.1.02.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
42	1.06.04.1.02.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
43	1.06.04.1.02.13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti
44	1.06.04.1.03.01	Penyediaan Permakanan
45	1.06.04.1.03.02	Penyediaan Sandang
46	1.06.04.1.03.04	Penyediaan Alat Bantu
47	1.06.04.1.03.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial

4

NO	KODE	SUBKEGIATAN
48	1.06.04.1.03.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
49	1.06.04.1.04.01	Penyediaan Permakanan
50	1.06.04.1.04.02	Penyediaan Sandang
51	1.06.04.1.04.04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
52	1.06.04.1.04.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
53	1.06.04.1.05.01	Penyediaan Permakanan
54	1.06.04.1.05.02	Penyediaan Sandang
55	1.06.04.1.05.04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
56	1.06.04.1.05.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
57	1.06.06.1.01.01	Penyediaan Permakanan
58	1.06.06.1.01.02	Penyediaan Sandang
59	2.11.03.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
60	2.11.03.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
61	2.11.03.1.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi
62	2.11.03.1.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
63	2.11.03.1.02.02	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
64	2.11.03.1.02.03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
65	2.11.03.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
66	2.11.03.1.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar
67	2.11.05.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
68	2.11.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
69	2.11.11.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional
70	2.11.11.1.01.02	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional
71	2.11.11.1.01.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional
72	2.11.11.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus

7

NO	KODE	SUBKEGIATAN
73	2.11.11.1.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
74	2.11.11.1.01.06	Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
75	2.11.11.1.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
76	2.14.02.1.02.03	Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
77	2.14.02.1.02.06	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
78	2.14.03.1.01.01	Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal
79	2.14.03.1.01.02	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal
80	2.14.03.1.01.03	Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal
81	2.14.03.1.01.04	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja
82	2.14.03.1.01.05	Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK
83	2.14.03.1.01.06	Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal
84	2.14.03.1.01.07	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal
85	2.14.03.1.01.08	Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi
86	2.14.03.1.02.01	Pengembangan Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
87	2.14.03.1.02.02	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
88	2.14.03.1.02.03	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK
89	3.27.03.1.01.05	Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan
90	3.27.04.1.01.03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular
91	3.27.04.1.03.03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
92	3.32.03.1.01.13	Pelayanan Kesehatan Transmigran
93	4.01.04.1.01.01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
94	4.01.04.1.01.02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual

7

NO	KODE	SUBKEGIATAN
95	4.01.04.1.02.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kescjahteraan Rakyat Bidang Kesehatan
96	4.02.05.4.01.02	Penyediaan Dana General Check-up Pimpinan dan Anggota DPR PB
97	5.05.02.1.02.06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
98	7.03.02.6.03.05	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kota Sehat di Kabupaten
99	9.01.02.7.01.06	Pembinaan Mental Spritual Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas Sederajat

4. Rincian Kegiatan Prioritas yang Didanai dari DAU Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota

NO	KODE	KEGIATAN
1.	1.2.2.201	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2.	1.2.2.202	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3.	1.2.2.203	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
4.	1.2.2.204	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
5.	1.2.3.201	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
6.	1.2.3.202	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
7.	1.2.3.203	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
8.	1.2.4.201	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
9.	1.2.4.202	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
10.	1.2.4.203	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
11.	1.2.4.204	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
12.	1.2.4.205	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
13.	1.2.4.206	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan

7

		Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
14.	1.2.5.201	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
15.	1.2.5.202	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
16.	1.2.5.203	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

5. Rincian Subkegiatan Prioritas yang Didanai dari DAU Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota

NO	KODE	SUBKEGIATAN
1	1.02.05.2.01.0 1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
2	1.02.05.2.02.0 1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
3	1.02.03.2.03.0 1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
4	1.02.02.2.01.2 1	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
5	1.02.02.2.01.0 3	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
6	1.02.02.2.01.0 2	Pembangunan Puskesmas
7	1.02.02.2.01.0 1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
8	1.02.02.2.01.2 0	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
9	1.02.02.2.01.1 4	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
10	1.02.02.2.01.1 6	Pengadaan Obat, Vaksin
11	1.02.02.2.01.0 7	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
12	1.02.02.2.01.0 6	Pengembangan Puskesmas
13	1.02.02.2.01.0 5	Pengembangan Rumah Sakit
14	1.02.02.2.01.1 0	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
15	1.02.02.2.01.0 9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
16	1.02.02.2.01.0 8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
17	1.02.02.2.02.3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas

7

NO	KODE	SUBKEGIATAN
18	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
19	1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
20	1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
21	1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
22	1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
23	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
24	1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
25	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
26	1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
27	1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
28	1.02.02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
29	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
30	1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
31	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
32	1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
33	1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
34	1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
35	1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
36	1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
37	1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
38	1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar

6. Rincian Subkegiatan Pendukung yang Didanai dari DAU Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota

NO	KODE	SUBKEGIATAN
1	1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
2	1.03.03.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM

7

NO	KODE	SUBKEGIATAN
3	1.03.03.2.01.03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
4	1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
5	1.03.03.2.01.05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
6	1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
7	1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
8	1.03.03.2.01.08	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
9	1.03.03.2.01.10	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri
10	1.03.03.2.01.11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat
11	1.03.03.2.01.12	Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM
12	1.03.03.2.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama SPAM
13	1.03.03.2.01.14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM
14	1.03.03.2.01.15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan
15	1.03.03.2.01.16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan
16	1.03.03.2.01.17	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
17	1.03.03.2.01.18	Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
18	1.03.03.2.01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
19	1.03.03.2.01.20	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
20	1.03.03.2.01.21	Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
21	1.03.04.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota
22	1.03.04.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota
23	1.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
24	1.03.04.2.01.04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
25	1.03.04.2.01.05	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
26	1.03.04.2.01.06	Penyediaan Sarana Persampahan
27	1.03.04.2.01.07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan
28	1.03.04.2.01.08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

7

NO	KODE	SUBKEGIATAN
29	1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
30	1.03.05.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
31	1.03.05.2.01.03	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota
32	1.03.05.2.01.04	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
33	1.03.05.2.01.05	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
34	1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
35	1.03.05.2.01.07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik
36	1.03.05.2.01.08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
37	1.03.05.2.01.09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik
38	1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
39	1.03.05.2.01.11	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
40	1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
41	1.03.05.2.01.13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja
42	1.03.05.2.01.14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
43	1.05.03.2.03.01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
44	1.05.03.2.03.06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit
45	1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
46	1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
47	1.06.04.2.02.06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti
48	1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
49	1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
50	1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan
51	1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan
52	1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang

7

NO	KODE	SUBKEGIATAN
53	2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
54	2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
55	2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
56	2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
57	2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
58	2.11.03.2.02.02	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
59	2.11.03.2.02.03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
60	2.11.03.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
61	2.11.03.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar
62	2.11.05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
63	2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3
64	2.11.05.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
65	2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
66	2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
67	2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
68	2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
69	2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
70	2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

7

NO	KODE	SUBKEGIATAN
71	2.11.11.2.01.06	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan
72	2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota
73	2.11.11.2.03.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah
74	2.11.11.2.03.02	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah
75	2.11.11.2.03.03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah
76	2.14.02.2.01.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK
77	2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
78	2.14.02.2.02.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK
79	2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
80	2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal
81	2.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK
82	2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
83	2.14.03.2.01.05	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK
84	2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
85	2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
86	2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK
87	2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
88	2.14.03.2.02.02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB
89	2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
90	2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
91	2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
92	2.14.03.2.03.02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB

7

NO	KODE	SUBKEGIATAN
93	2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
94	2.14.03.2.03.04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP
95	2.14.03.2.03.05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB
96	2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
97	2.14.03.2.03.07	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB
98	2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
99	2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan
100	2.14.03.2.03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
101	2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
102	2.14.03.2.03.12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran
103	2.14.03.2.03.13	Peningkatan Kesertaan KB Pria
104	2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
105	2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
106	2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
107	2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB
108	4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
109	7.01.03.2.05.01	Pencegahan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
110	7.01.03.2.05.02	Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
111	7.01.03.2.05.03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
112	7.01.03.2.05.04	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
113	X.XX.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
114	X.XX.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

7

E. KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN PRIORITAS SERTA KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN PENDUKUNG YANG DIDANAI DARI DAU BIDANG PEKERJAAN UMUM

1. Rincian Kegiatan Prioritas yang Didanai dari DAU Bidang Pekerjaan Umum untuk Provinsi

NO	KODE	KEGIATAN
1.	1.3.2.101	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2.	1.3.2.102	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3.	1.3.3.101	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
4.	1.3.4.101	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
5.	1.3.5.101	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
6.	1.3.6.101	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi
7.	1.3.7.101	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi
8.	1.3.8.101	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
9.	1.3.9.101	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
10.	1.3.10.101	Penyelenggaraan Jalan Provinsi

2. Rincian Subkegiatan Prioritas yang Didanai dari DAU Bidang Pekerjaan Umum untuk Provinsi

NO	KEGIATAN
1.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM;
2.	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM;
3.	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan;
4.	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan;
5.	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan;
6.	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan;
7.	Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota;
8.	Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi;
9.	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota;
10.	Survei dan Investigasi untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota;

7

NO	KEGIATAN
11.	Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota;
12.	Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota.
13.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
14.	Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk;
15.	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat;
16.	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional;
17.	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat;
18.	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik;
19.	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik;
20.	Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota;
21.	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
22.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan;
23.	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan;
24.	Pengelolaan Leger Jalan;
25.	Survey Kondisi Jalan/Jembatan;
26.	Pembangunan Jalan;
27.	Pelebaran Jalan Menuju Standar;
28.	Pelebaran Jalan Menambah Lajur;
29.	Rekonstruksi Jalan;
30.	Rehabilitasi Jalan;
31.	Pemeliharaan Berkala Jalan;
32.	Pemeliharaan Rutin Jalan;
33.	Pembangunan Jembatan;
34.	Pembangunan Flyover;
35.	Pembangunan Underpass;
36.	Pembangunan Terowongan/Tunnel;
37.	Penggantian Jembatan;
38.	Pelebaran Jembatan;
39.	Rehabilitasi Jembatan;
40.	Pemeliharaan Rutin Jembatan;
41.	Pemeliharaan Berkala Jembatan;
42.	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat;
43.	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan;
44.	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan;
45.	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya;
46.	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku;
47.	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya;
48.	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku;

7

NO	KEGIATAN
49.	Pembangunan Unit Air Baku;
50.	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya;
51.	Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku;
52.	Rehabilitasi Unit Air Baku;
53.	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya;
54.	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku;
55.	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku;
56.	Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku;
57.	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa;
58.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan;
59.	Rehabilitasi Bendung Irigasi;
60.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa;
61.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak;
62.	Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah;
63.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah;
64.	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan;
65.	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi;
66.	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa;
67.	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak;
68.	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah;
69.	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah;

3. Rincian Kegiatan Prioritas yang Didanai dari DAU Bidang Pekerjaan Umum untuk Kabupaten/Kota

NO	KODE	KEGIATAN
1.	1.3.2.201	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.	1.3.2.202	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3.	1.3.3.201	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
4.	1.3.4.201	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
5.	1.3.5.201	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
6.	1.3.6.201	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
7.	1.3.7.201	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
8.	1.3.8.201	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
9.	1.3.9.201	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
10.	1.3.10.201	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

7

4. Rincian Subkegiatan Prioritas yang Didanai dari DAU Bidang Pekerjaan Umum untuk Kabupaten/Kota

NO	KEGIATAN
1.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
2.	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM
3.	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
4.	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
5.	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
6.	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
7.	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
8.	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
9.	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum
10.	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri
11.	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat
12.	Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama SPAM
13.	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM
14.	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan
15.	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan
16.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
17.	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
18.	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota
19.	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
20.	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
21.	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
22.	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik
23.	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
24.	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik
25.	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
26.	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
27.	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
28.	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
29.	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT
30.	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT
31.	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT

7

NO	KEGIATAN
32.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
33.	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan
34.	Pengelolaan Leger Jalan
35.	Survey Kondisi Jalan/Jembatan
36.	Pembangunan Jalan
37.	Pelebaran Jalan Menuju Standar
38.	Pelebaran Jalan Menambah Lajur
39.	Rekonstruksi Jalan
40.	Rehabilitasi Jalan
41.	Pemeliharaan Berkala Jalan
42.	Pemeliharaan Rutin Jalan
43.	Pembangunan Jembatan
44.	Pembangunan <i>Flyover</i>
45.	Pembangunan <i>Underpass</i>
46.	Pembangunan Terowongan/ <i>Tunnel</i>
47.	Penggantian Jembatan
48.	Pelebaran Jembatan
49.	Rehabilitasi Jembatan
50.	Pemeliharaan Rutin Jembatan
51.	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
52.	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku
53.	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
54.	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku
55.	Pembangunan Unit Air Baku
56.	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya
57.	Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku
58.	Rehabilitasi Unit Air Baku
59.	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
60.	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku
61.	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku
62.	Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku
63.	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
64.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

7

NO	KEGIATAN
65.	Rehabilitasi Bendung Irigasi
66.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
67.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak
68.	Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
69.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah
70.	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
71.	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi
72.	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa
73.	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak
74.	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
75.	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI